

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**PENGUATAN LITERASI DIGITAL GUNA MENJAGA STABILITAS
KEAMANAN MENJELANG PEMILU TAHUN 2024
DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL**

OLEH:

**HERI SETYAWAN, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXV**

LEMHANNAS RI

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul **“Penguatan Literasi Digital Guna Menjaga Stabilitas Keamanan Menjelang Pemilu Tahun 2024 Dalam Rangka Ketahanan Nasional”**.

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXV Tahun 2023 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXV di Lemhannas RI tahun 2023. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami Bapak Laksamana Muda TNI Edi Sucipto, S.E., M.M., M.Tr. Opsla dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini. Besar harapan kami agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Agustus 2023

Penulis

Heri Setyawan, S.IK, MH
Kombes Pol. NRP. 71040682



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heri Setyawan, S.IK, MH

Pangkat : Komisaris Besar Polisi

Jabatan : Analis Kebijakan Madya

Instansi : Mabes Polri

Alamat : Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXV tahun 2023 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, Agustus 2023

Penulis Taskap,

Materai

Heri Setyawan, S.IK, MH.
Kombes Pol. NRP. 71040682

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

DAFTAR ISI		Halaman
KATA PENGANTAR.....		i
PERNYATAAN KEASLIAN.....		iii
DAFTAR ISI.....		iv
DAFTAR TABEL.....		vi
DAFTAR GAMBAR		vii
BAB I PENDAHULUAN		
1. Latar Belakang		1
2. Rumusan Masalah		5
3. Maksud dan Tujuan		6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika		6
5. Metode dan Pendekatan		7
6. Pengertian		8
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN		
7. Umum		10
8. Peraturan Perundang-undangan		11
9. Data dan Fakta.....		16
10. Kerangka Teoretik.....		18
11. Lingkungan Strategis		22
BAB III PEMBAHASAN		
12. Umum		26
13. Pemahaman Literasi Digital Masyarakat Dalam Kehidupan Politik Saat Ini		28
14. Pemetaan Ancaman Stabilitas Politik dan Keamanan Dalam Tahapan Pemilu 2024 Pada Aspek Media Sosial/Digital.....		40

15. Kondisi Literasi Digital Masyarakat Dalam Kehidupan Politik Masih Rendah dan Rentan Terpengaruh oleh Berita yang Menyesatkan...	52
16. Strategi Penguatan Literasi Digital Guna Menjaga Stabilitas Keamanan Menjelang Pemilu Tahun 2024 Dalam Rangka Ketahanan Nasional	59

BAB IV PENUTUP

17. Simpulan	81
18. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN:

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Identifikasi SWOT
- Tabel 2. IFAS Penguatan Literasi Digital
- Tabel 3. EFAS Penguatan Literasi Digital
- Tabel 4. Posisi Penguatan Literasi Digital
- Tabel 5. Matriks SWOT Penguatan Literasi Politik



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Tingkat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Per Provinsi
- Gambar 2. Data Pengguna Media Sosial
- Gambar 3. Posisi Penguatan Literasi Digital



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dewasa ini semakin masif. Dapat dikatakan perkembangan teknologi saat ini terus bertambah secara eksponensial. Hal ini menyusul dengan adanya Revolusi Industri 4.0, yang mana mengakomodasi perkembangan teknologi lebih cepat lagi. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan perpaduan sistem digital dan fisik. Integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, *internet of things* (IoT), otomatisasi, dan robotika telah menghasilkan beberapa peningkatan di berbagai sektor. Perkembangan ini telah mempengaruhi beberapa aspek kehidupan manusia, termasuk kesehatan, manufaktur, transportasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi revolusioner telah dimungkinkan melalui Industri 4.0, memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan operasi mereka, dan mencapai efisiensi yang lebih besar dalam alokasi sumber daya.

Salah satu manfaat utama Revolusi Industri 4.0 adalah pembentukan dan perluasan pabrik cerdas yang memanfaatkan sistem siber-fisik untuk melakukan tugas kompleks dengan campur tangan manusia seminimal mungkin. Di satu sisi, teknologi akan menghasilkan peningkatan produktivitas, namun di sisi lain akan menyebabkan pengurangan tenaga kerja manual oleh manusia. Salah satu bukti nyata perkembangan teknologi adalah meningkatnya penggunaan media sosial hingga saat ini. Hal tersebut juga diiringi dengan perkembangan fitur dan fungsi dari media sosial itu sendiri yang terus menawarkan berbagai kemudahan yang menarik minat dari berbagai lapisan masyarakat sebagai pengguna. Adapun media sosial tertinggi yang diakses masyarakat Indonesia, antara lain adalah Whatsapp (88,7%), Instagram (84,8%), Facebook (81,3%), TikTok (63,1%), dan Telegram (62,8%).¹

¹ "Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022"., sumber: <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>. diakses tanggal 12 Februari 2023

Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2023 pengguna aktif media sosial internet di Indonesia sebanyak 215,63 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 2,67% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 210,03 juta orang.² Microsoft merilis tentang indeks keberadaban digital atau *digital civility index* pada tahun 2020 yang menempatkan Indonesia di urutan nomor 29 dari 32 negara.³ Hal ini menunjukkan bahwa media sosial atau internet telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bahkan waktu yang dihabiskan dalam bermedia sosial dan menggunakan internet di Indonesia mencapai mencapai 7 Jam 42 menit setiap harinya. Angka ini merupakan durasi yang tertinggi kesepuluh di dunia.⁴ Bayangkan saja hampir setengah dari waktu hidup orang Indonesia dalam satu hari digunakan untuk mengakses internet dan media sosial untuk mencari informasi. Suatu tantangan menarik jika masyarakat Indonesia menaruh perhatian pada internet dan media sosial terhadap berbagai informasi mengenai apa yang nyata dan apa yang palsu di internet.

Kondisi ini dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya adalah perilaku milenial, yaitu generasi yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996. Millenial dicirikan sebagai generasi yang sangat berorientasi pada teknologi dan sangat bergantung pada *platform* media sosial. Mereka diketahui memiliki perilaku tertentu dalam penggunaan media sosial, yang meliputi *multitasking* di berbagai platform dan perangkat, mencari validasi melalui suka dan berbagi (*like and share*), dan lebih cenderung memprioritaskan pengalaman dari pada kepemilikan materi. Perilaku ini telah menyebabkan munculnya budaya *influencer* dan ledakan bisnis online, karena preferensi milenial telah bergeser ke dukungan media sosial daripada tradisional.

² Pangguna Internet di Indonesia Makin Tinggi

<https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-internet-di-indonesia-makin-tinggi#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20survei%20Asosiasi%20Penyelenggara,sebanyak%20210%2C03%20juta%20pengguna>. Diakses tanggal 21 Februari 2023

³ Indeks Keberadaban Digital: Indonesia Terburuk se-Asia Tenggara sumber: <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-keberadaban-digital-indonesia-terburuk-se-asia-tenggara/5794123.html> diakses tanggal 20 Februari 2023

⁴ We are Sosial, Pengguna Media Sosial di Indonesia Sebanyak 167 Juta pada 2023.

<https://dataindonesia.id/Digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023> diakses tanggal 12 Februari 2023

Faktor lainnya adalah adanya pandemi Covid-19. Kondisi ini telah membawa perubahan signifikan pada kehidupan sehari-hari masyarakat di seluruh dunia. Pemerintah dan otoritas kesehatan di seluruh dunia telah menerapkan langkah-langkah untuk memperlambat penyebaran virus, seperti penguncian, aturan jarak sosial, dan pembatasan perjalanan. Akibatnya, pandemi berdampak besar pada aktivitas dan perilaku masyarakat. Salah satu dampak langsung dari pandemi ini adalah pada kehidupan kerja masyarakat. Banyak bisnis dan organisasi harus menerapkan kebijakan kerja dari rumah, yang sangat mengurangi jumlah orang yang bepergian dan bepergian ke tempat kerja. Akhirnya masyarakat terpaksa harus beradaptasi dan melaksanakan kebiasaan baru. Hal yang paling nyata terlihat dengan meningkatnya penggunaan internet atau media sosial sebagai alat untuk kerja dan berbisnis, termasuk untuk pemenuhan kebutuhan pokok selama pandemi dilakukan melalui media sosial. Dengan demikian, hal tersebut menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap media sosial (*online*).

Media sosial atau internet bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi berdampak positif karena menyediakan kemudahan sarana akses informasi bagi masyarakat yang begitu dekat, sebagai sarana pembelajaran, dan sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi politik. Namun di sisi lain, penggunaan internet juga dapat berdampak negatif yang dipicu oleh penyalahgunaan media sosial, tersebabnya hoaks dan disinformasi, sebagai sarana *blackcampaign* dan propaganda, dan bahkan pergerakan masa yang memicu pada permasalahan keamanan. Terlepas dampak positif dan negatif dari media sosial, saat ini hal tersebut telah menjadi alat yang dinilai efektif sebagai alat komunikasi politik. Penggunaan media sosial mampu memberikan dampak pengaruh ke publik melalui konten yang dibagikan ke publik, dan publik akan memberikan *feedback* sebagai bentuk aspirasi publik yang diterima oleh aktor politik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia tidak lama lagi akan menyelenggarakan pesta demokrasi, yaitu Pemilu 2024. Kita tentunya sangat memahami bahwa Pemilu Tahun 2024 merupakan Pemilu yang istimewa, mengingat untuk pertama kalinya Pemilu dilaksanakan bersamaan

dengan Pilkada Serentak pada tahun 2024. Oleh karena itu, riuh demokrasi akan begitu ramai termasuk dalam ranah media sosial. Tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, khususnya pada area internet dan media sosial akan semakin sulit. Tercatat bahwa aksi mobilisasi masa terbentuk akibat adanya provokasi di media sosial yang memicu keadaan semakin pelik. Sebagai mana penelitian Tiara tahun 2021 yang menunjukkan bahwa sosial media memiliki peran penting dalam memobilisasi masa untuk protes sosial hal ini diimplementasikan melalui *hashtag* seperti *#AksiBelalIslam* *#GejayanMemanggil* dan sebagainya.⁵

Dalam menghadapi hal tersebut tentunya dampak negatif media sosial atau pun internet harus ditekan sekeras-kerasnya dan dampak positif harus dimaksimalkan guna menunjang demokrasi yang sehat dan kondisi stabilitas politik dan keamanan yang baik. Berkaca pada Pemilu Tahun 2019, yang mana banyak sebaran berita bohong (hoaks) dan disinformasi. Bisa dibayangkan bagaimana perhelatan pesta demokrasi yang merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan dan lembaga perwakilan politik yang memiliki legitimasi kuat dari rakyat, justru menjadi ajang berkembangnya berita hoaks dan polarisasi di masyarakat, khususnya pada saat masa kampanye.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu pada Pemilu tahun 2019, ditemukan sebanyak 922 isu hoaks dan sebanyak 557 kasus di antaranya ditemukan pada Maret hingga Mei 2019 yang merupakan masa puncak Pemilu Tahun 2019.⁶ Tidak hanya itu, merebaknya berita hoaks di tengah keterbukaan publik dan kemudahan akses informasi akan berdampak pada terjadinya polarisasi dimasyarakat yang mengarah pada konflik sosial. Hal ini dapat mengancam stabilitas keamanan dalam negeri, apalagi hal tersebut terjadi pada saat perhelatan Pemilu, yang mana polarisasi dan konflik akan menemukan momentumnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan untuk

⁵ Peran Sosial Media Pada Gerakan Protes Massa Aksi dan Demokrasi Baru di Era Milenia sumber : <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/kjc/article/view/31-02>, diakses tanggal 12 Februari 202

⁶ Bawaslu, *Isu-Isu Krusial Pemilu Tahun 2024*, disampaikan pada Rapat Kerja Internal dalam rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan oleh KPU

mendorong penguatan literasi digital menjadi aspek yang vital. Literasi digital tersebut dapat berperan sebagai aspek yang dapat menekan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari adanya media sosial dan internet. Literasi digital harus dijadikan sebagai sarana aktivitas sosialisasi informasi dan edukasi pada dunia digital.

Literasi digital oleh UNESCO, diartikan sebagai kecakapan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengomunikasikan konten dengan kecakapan etika, kognitif, emosional, sosial dan aspek teknis. Dalam konteks Pemilu, dapat dilakukan literasi politik digital yang mana hal tersebut dapat membentuk kemampuan masyarakat untuk mendefinisikan kebutuhan informasi mengenai substansi politik, mengetahui strategi pencarian informasi seputar kandidat politik, dan memiliki kemampuan untuk mengakses informasi politik yang kredibel⁷.

Kehadiran literasi digital, khususnya di bidang politik, melindungi masyarakat dari misinformasi dan hoaks, yang dapat berubah menjadi kebijakan identitas negatif dan memicu munculnya konflik sosial di masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penguatan literasi digital dalam rangka menjaga keamanan menjelang Pemilu 2024 dalam rangka ketahanan nasional.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang di atas, maka untuk mengantisipasi berbagai ancaman dampak negatif terhadap penggunaan media sosial dan perkembangan teknologi ditengah masyarakat, dibutuhkan strategi dalam menguatkan literasi digital masyarakat dalam menghadapi tahun politik 2024. Dengan demikian rumusan masalah dalam penulisan Taskap ini adalah ***bagaimana penguatan literasi digital guna menjaga stabilitas keamanan menjelang Pemilu Tahun 2024 dalam rangka ketahanan nasional?***

⁷ Pemilih Muda dan Literasi Politik Digital

Sumber: <https://mediaindonesia.com/opini/513375/pemilih-muda-dan-literasi-politik-digital>, diakses tanggal 12 Februari 2023

Dari rumusan masalah diatas, disusunlah pertanyaan-pertanyaan kajian yang akan dibahas dalam Taskap ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemahaman literasi digital masyarakat dalam kehidupan politik saat ini?
- b. Bagaimana pemetaan ancaman stabilitas politik dan keamanan dalam tahapan Pemilu 2024 pada aspek media sosial/digital?
- c. Mengapa literasi digital masyarakat dalam kehidupan politik masih rendah dan rentan terpengaruh oleh berita yang menyesatkan?
- d. Bagaimana strategi penguatan literasi digital guna menjaga stabilitas keamanan menjelang Pemilu Tahun 2024 dalam rangka ketahanan nasional?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Taskap ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran, analisis dan rekomendasi tentang penguatan literasi digital bagi masyarakat guna menjaga stabilitas keamanan menjelang Pemilu Tahun 2024 dalam rangka ketahanan nasional.

b. Tujuan

Taskap ini dibuat dengan tujuan memberikan kontrobusi berupa sumbangan pemikiran berdasarkan fakta-fakta yang ada kepada para pemangku kebijakan dan pihak-ihak yang berkepentingan terkait dengan penguatan literasi digital bagi masyarakat guna menjaga stabilitas keamanan menjelang Pemilu Tahun 2024 dalam rangka ketahanan nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang akan dibahas pada Taskap ini dibatasi dan difokuskan pada strategi dan upaya yang dilakukan Pemerintah dalam rangka penguatan literasi digital bagi masyarakat guna menjaga

stabilitas keamanan menjelang Pemilu Tahun 2024 dalam rangka ketahanan nasional.

b. Sistematika

- 1) Bab I—Pendahuluan, meliputi latar belakang yang menggambarkan secara singkat bagaimana dinamika perkembangan teknologi informasi beserta dampak dan tantangannya kedepan khususnya menjelang tahun politik 2024, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan serta pengertian.
- 2) Bab II—Tinjauan Pustaka, meliputi rujukan-rujukan dan landasan teori yang dijadikan sebagai kerangka analisis, terdiri dari peraturan perundangan-undangan, data dan fakta, kerangka teoretis, serta lingkungan strategis.
- 3) Bab III—Pembahasan, berisi pembahasan data data yang terkait dengan pertanyaan pertanyaan kajian berdasarkan teori dan peraturan perundang undangan yang relevan, untuk bisa diperoleh faktor penyebab masalah (akar masalah) dan cara mengatasinya.
- 4) Bab IV—Penutup, berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dan pihak terkait.



5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam Taskap ini ialah metode analisis kualitatif/deskriptif. Metode ini menekankan pada pengumpulan dan analisis penyajian data dan fakta berdasarkan metode penelitian literatur (studi kepustakaan) dari data sekunder.

b. Pendekatan

Taskap ini menggunakan pendekatan dengan perspektif kepentingan nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoretis dan dasar-dasar regulasi yang digunakan.

6. Pengertian

Guna memastikan dan menghindari perbedaan persepsi dan penafsiran terkait dengan beberapa istilah dalam Taskap ini, maka disusun beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Literasi digital, sebagaimana didefinisikan oleh UNESCO, adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, dan mengomunikasikan konten dengan aspek etika, kognitif, emosional, sosial, dan teknis.
- b. Stabilitas merupakan suatu kondisi dari sebuah sistem yang komponennya cenderung tetap di dalam atau kembali pada suatu hubungan yang sudah mantap. Stabilitas sama dengan tiadanya perubahan yang mendasar atau kacau di dalam suatu sistem politik atau perubahan yang terjadi pada batas-batas yang telah disepakati/ditentukan.⁸
- c. Keamanan merupakan kewajiban suatu negara untuk menjamin terciptanya suatu kondisi yang aman serta mengatur ketertiban sehingga mensyaratkan dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang dan melindungi negara tersebut. Dalam hubungan internasional, semua itu ditujukan untuk kemakmuran, keadilan, serta kesejahteraan seluruh rakyatnya sebagai fundamental.⁹
- d. Demokrasi merupakan suatu sistem dalam sebuah negara dimana setiap warganya memiliki hak, kewajiban, kekuasaan dan kedudukan untuk menjalankan kehidupannya dan berpartisipasi secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara adil dan jujur dalam turut serta menjalankan kekuasaan negara maupun mengawasi jalannya pemerintahan semata-mata untuk kepentingan rakyat.¹⁰
- e. Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakilnya di parlemen dari anggota DPR, DPRD, DPD, hingga presiden dan wakil presiden. Pemilu dilakukan secara langsung oleh rakyat dan

⁸ Jack Plano, "Kamus Analisa Politik (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1985) hal. 49

⁹ Didi Krisna "Kamus Politik Internasional" (Jakarta: Grasindo, 1993) hal. 245

¹⁰ Munir Fuady, "Konsep Negara Demokrasi" (Bandung, PT Refika Aditama: 2010) hal. 2

tanpa perwakilan kepada siapa pun. Warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dapat berpartisipasi. Pemilu harus bebas dari intervensi pihak lain dalam memberikan pilihan. Bersifat rahasia yang berarti pilihan yang diberikan tidak diketahui siapa pun. Selain itu, pelaksanaannya harus jujur dan dilakukan sesuai aturan yang berlaku, serta adil adanya perlakuan yang sama bagi peserta maupun pemilih berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹¹

- f. Ketahanan nasional adalah keadaan dinamis bangsa Indonesia yang meliputi ketangguhan dan kebulatan tekad untuk menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, yang datang langsung maupun tidak langsung baik dari luar maupun dalam negeri. Hal ini diharapkan akan melindungi keutuhan, identitas, dan ancaman terhadap kelangsungan hidup suatu negara bangsa dan negara.¹²
- g. *Cyberbullying* adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital.¹³
- h. *Platform digital* adalah sebuah wadah, tempat atau sarana yang memfasilitasi bertemunya, bertukar informasi atau berkomunikasi para pihak dengan pihak lainnya melalui media digital.¹⁴
- i. *Digital Knowledge Index* atau Indeks Literasi Digital Nasional adalah alat ukur yang menitikberatkan pada empat pilar yaitu kecakapan digital (*digital skill*), etika digital (*digital ethics*), keamanan digital (*digitl safety*), dan budaya digital (*digital culture*)

¹¹ *Op.Cit.* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹² Lemhannas Republik Indonesia

¹³ <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying> diakses tanggal 16 Agustus 2023

¹⁴ <https://digitalbisa.id/artikel/apa-itu-digital-platform-LL6CQ> diakses tanggal 16 Agustus 2023

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Ketika dunia menjadi semakin digital dan seiring meningkatnya penggunaan media sosial, penting bagi setiap individu untuk memiliki keterampilan literasi digital yang memungkinkan mereka menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan mencegah penyebaran informasi yang salah. Salah satu aspek penting literasi digital adalah kemampuan untuk menilai kredibilitas sumber online dan memeriksa fakta informasi sebelum membagikannya di *platform* media sosial. Hal ini sangat penting dalam konteks mencegah polarisasi dan konflik, karena informasi yang salah atau menyesatkan seringkali dapat memicu kesalahpahaman dan memperburuk situasi yang sudah bermuatan politik. Literasi digital juga melibatkan pengetahuan bagaimana berkomunikasi secara efektif dan sopan secara *online*, serta memahami konsekuensi potensial dari tindakan kita di media sosial. Untuk mencegah semakin parahny konflik, keterampilan literasi digital harus diajarkan dan disosialisasikan di semua lapisan masyarakat, mulai dari sekolah hingga tempat kerja.

Selain itu, perusahaan media sosial memiliki tanggung jawab untuk membantu mempromosikan literasi digital dengan menerapkan langkah-langkah yang memprioritaskan informasi yang kredibel dan akurat daripada konten yang sensasional atau menyesatkan. Pada akhirnya, setiap pengguna harus menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan penuh rasa hormat, serta memahami literasi digital. Dengan mengembangkan literasi digital dan mempromosikan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, kita dapat membantu mencegah penyebaran informasi palsu di masyarakat yang dapat menyebabkan perpecahan.

Pada bab ini akan diuraikan secara komprehensif berbagai peraturan perundang-undangan, kerangka teoretis, data/fakta hasil penelitian dan perkembangan lingkungan strategis, yang akan digunakan sebagai pedoman atau dasar berpikir dalam menganalisis berbagai upaya penguatan literasi

digital guna menjaga stabilitas keamanan menjelang Pemilu Tahun 2024 dalam rangka ketahanan nasional.

8. Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam pembahasan mengenai penguatan literasi digital guna menjaga stabilitas keamanan menjelang Pemilu Tahun 2024 dalam rangka ketahanan nasional antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur beberapa hak warga negara yang berkaitan dengan substansi yang akan dibahas dalam Taskap ini. Dalam Pasal 28E ayat (3) menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Kemudian dalam Pasal 28C ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Di sisi lain, Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun nonformal berupa pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka sosialisasi suatu kebijakan. Selanjutnya, dalam Pasal 28F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Namun, di sisi lain berdasarkan Pasal 1 ayat (3), menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Beberapa ahli mendefinisikan hukum sebagai peraturan yang bersifat memaksa atau suatu perintah yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Negara hukum dapat dimaknai bahwa segala

tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Konsep negara hukum juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, adanya pemisahan dan pembatasan kekuasaan, adanya jaminan hak asasi manusia, adanya prinsip peradilan yang bebas tidak memihak, menjamin kesamaan setiap warga negara dalam hukum, serta adanya jaminan keadilan bagi setiap orang.¹⁵ Hal ini juga harus menjadi dasar yang melandasi dalam penerapan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta hak dalam berkomunikasi, memperoleh dan menyampaikan informasi.

Oleh karena itu, dalam norma-norma tersebut secara umum terdapat tiga tujuan utama yang hendak dicapai, yaitu:¹⁶

- 1) Mengarahkan aparat negara dalam memastikan tidak adanya kebijakan dan tindakan pelanggaran terhadap kebebasan berkumpul dan berorganisasi. Selain itu, aparat negara juga wajib untuk memperoleh dan menyampaikan informasi baik sejak perencanaan, pengaturan sampai dengan pelaksanaannya, serta memastikan proses hukum dan pemberian sanksi bagi pelaku atas setiap tindakan pelanggaran terhadap kebebasan berkumpul dan berorganisasi.
- 2) Mengarahkan individu, termasuk di dalamnya adalah kelompok masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan, agar memahami segala hal terkait tindakan pelanggaran terhadap kebebasan berkumpul dan berorganisasi. Selain itu, mereka berhak memperoleh dan menyampaikan informasi sehingga dapat memastikan hak asasinya terlindungi dan tidak melakukan tindakan diskriminatif yang dapat memperkecil ruang masyarakat sipil dalam mengekspresikan hak kebebasan berkumpul.

¹⁵ Ridlwan Zurkarnain, Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwacherstaat*? Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, ISSN 1978-5186 hal. 143

¹⁶ Diadaptasi dari (Standar Norma dan *Setting* Hak Atas Kebebasan Berumpul dan Berorganisasi yang disusun oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) hal. 5

3) Mengarahkan aktor nonnegara agar menghormati hak masyarakat dengan cara menghindari tindakan yang membatasi hak kebebasan berkumpul dan berorganisasi. Selain itu, mereka juga harus menghindari tindakan yang membatasi upaya untuk memperoleh informasi serta menghindari menyampaikan informasi yang tidak benar atau merugikan di ruang publik.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang lebih dikenal dengan UU ITE merupakan *cyber law* pertama yang disusun oleh Indonesia. UU ITE merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik sendiri dapat diartikan sebagai suatu kumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail/e-mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami.¹⁷ Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan berkembang, memunculkan modus operandi kejahatan baru yaitu *cyber crime* atau kejahatan melalui media internet, antara lain penistaan, penghinaan, dan fitnah (*hate speech*), kejahatan terhadap hak merk (*trademark*) dan hak cipta (*copyright*), pencemaran nama baik, penyerangan terhadap sistem informasi, transaksi elektronik ilegal dan kejahatan serupa lainnya.¹⁸

Oleh karena itu, UU ITE mengatur mengenai berbagai perbuatan yang dilarang dalam penggunaan teknologi informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 yang menyatakan:

¹⁷ Punik Triesti Wijayanti dan Dona Budi Kharisma "Analisis Penerapan Undang-Undang Ite Ditinjau Dari Legal Drafting Theori Oleh Teori Formil Rick Dikerson" (Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Volume 1, Nomor 4, tahun 2022) hal. 581

¹⁸ Atika Mardhiya dkk, UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, Volume 7 No. 2, 2021, hlm. 313

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- 4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Selanjutnya dalam Pasal 28 menyatakan:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Kemudian dalam Pasal 29 yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Dengan adanya UU ITE ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan mengenai *cyber crime* di Indonesia sekaligus menjadi payung hukum untuk melindungi pengguna internet dan media sosial dari berbagai tindakan kejahatan yang terjadi secara digital. Dengan demikian, ke depannya akan tercipta lingkungan digital yang

aman, kondusif bagi pengguna, serta diharapkan dapat terhindar dari penyalahgunaan atas pemanfaatan teknologi informasi.

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu)

Dalam Undang-Undang Pemilu tidak banyak yang mengatur mengenai digitalisasi atau sistem informasi. Pengaturan sistem informasi antara lain terdapat dalam Pasal 218 yang mengatur mengenai bagaimana tata kelola data pemilih yang menyatakan:

- 1) KPU dan KPU kabupaten/kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan.
- 2) KPU dan KPU kabupaten/kota wajib memelihara dan memutakhirkan data pemilih.

Penggunaan sistem informasi lainnya pada tahapan pemilu hanya sebagai alat nonhukum, antara lain Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang digunakan sebagai alat bantu dalam pendaftaran partai politik peserta Pemilu. Selanjutnya, ada Sistem Data Pemilih (SIDALIH) yang digunakan sebagai alat bantu untuk pemutakhiran data pemilih. Kemudian, Sistem Pencalonan (SILON) yang digunakan sebagai alat bantu untuk proses pendaftaran calon anggota legislatif. Terakhir, Sistem Rekapitulasi (SIREKAP) yang digunakan sebagai alat bantu dalam pelaksanaan proses rekapitulasi suara.

Pengaturan lain yang berkaitan erat dengan pokok pembahasan Taskan adalah pengaturan mengenai metode kampanye yang dilakukan peserta Pemilu yaitu kampanye melalui media sosial dan kampanye melalui iklan media masa cetak, media masa elektronik dan internet sebagaimana diatur dalam Pasal 275 ayat (1) huruf e dan huruf f.

Bahkan dalam undang-undang Pemilu juga diatur mengenai larangan pelaksanaan kampanye, sebagaimana diatur dalam 280 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim Kampanye

Pemilu dilarang: (a) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; (d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; (e) mengganggu ketertiban umum; (f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; (g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; (h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; (i) membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan (j) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu. Secara tegas juga dinyatakan pelanggaran terhadap larangan ketentuan huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j merupakan tindak pidana Pemilu.

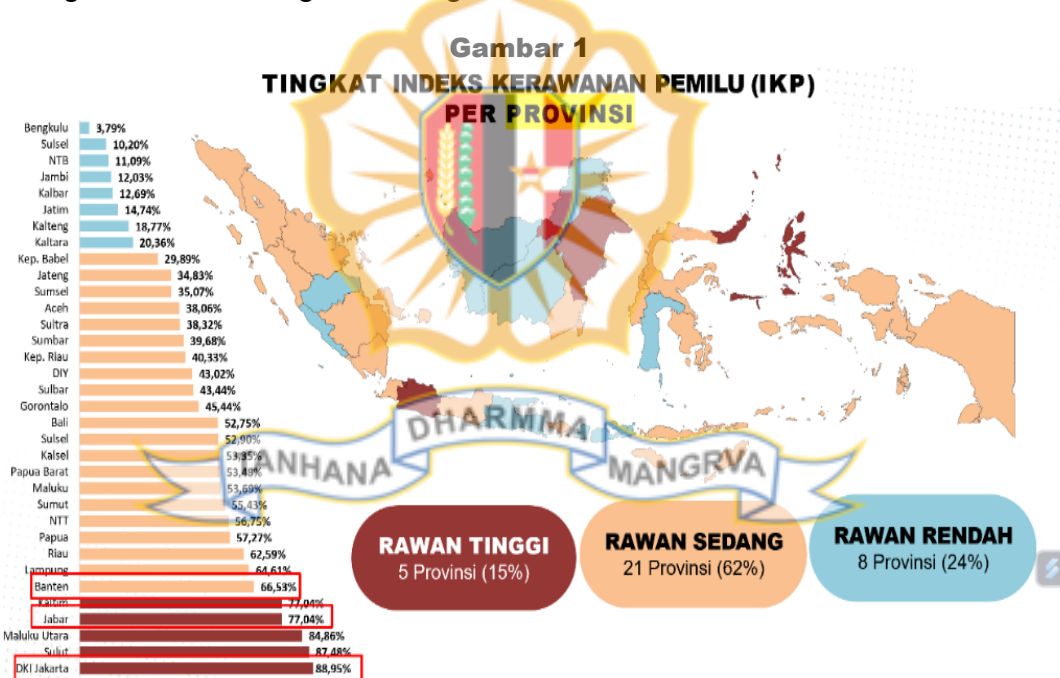
Selanjutnya dalam Pasal 292 ayat (2) dan Pasal 294 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa media massa cetak, media daring, media sosial dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dan harus mematuhi kode etik periklanan dengan standar tarif iklan yang sama untuk setiap peserta pemilu.

9. Data dan Fakta

Berdasarkan data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), hasil survei penetrasi internet Indonesia tahun 2023 menunjukkan data bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 215,63 juta pada periode 2022–2023. Jumlah tersebut meningkat hampir 2,67% dibandingkan dengan jumlah pengguna internet tahun

sebelumnya sebanyak 210,03%, yang jika dihitung setara dengan 78,19% dari total populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 275,77 juta jiwa.¹⁹

Jika dikategorikan berdasarkan provinsi diperoleh data pengguna internet tertinggi berada di Provinsi Banten yang mencapai 89,10%, diikuti Provinsi DKI Jakarta sebesar 86,96%, dan peringkat ketiga adalah Provinsi Jawa Barat mencapai 82,73%.²⁰ Tinggi jumlah pengguna internet di kota besar tentunya berbanding lurus dengan berbagai kemudahan informasi dan pelayanan pada masing-masing pemerintah daerah tersebut, tetapi di sisi lain juga memiliki potensi dampak negatif penyalahgunaan yang juga relatif tinggi. Sebagai contoh, kita dapat melihat hasil penilaian indeks kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2023 yang dirilis oleh Bawaslu RI, yang mana ketiga provinsi tersebut masuk dalam kategori rawan tinggi dan rawan sedang dengan rincian sebagai dalam gambar berikut:



Sumber, Bawaslu RI, 2023

Beberapa kasus lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan internet berdasarkan laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil, sejak tahun 2016 sampai bulan Februari 2020 menunjukkan tingkat penghukuman sebesar 96,8% (744 kasus) dengan angka 88% tingkat pemenjaraan (676 kasus).²¹ Mengutip

¹⁹ *Op. Cit*, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2023

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Op.Cit* Atika Mardhiya dkk,

hasil penelitian Fitria dan Pakpahan yang menganalisis penyalahgunaan media sosial di Indonesia, juga menunjukkan data jumlah pelanggaran yang signifikan dengan rincian sebagai berikut:²² (1) kasus pencemaran nama baik mencapai 5.061 kasus yang ditangani Polri mencapai 45%, (2) kasus penyebaran ujaran kebencian sebanyak 3.325 kasus. Angka tersebut naik 44,99% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.829 kasus. (3) kasus penyebaran berita bohong. Sebagai pengguna aktif media sosial maupun aplikasi pesan, masyarakat Indonesia rentan menerima informasi yang tidak tepat. Pada tahun 2018 dalam survey Mastel, 92,40% masyarakat menyatakan media sosial seperti Facebook, Twitter, maupun Instagram adalah saluran yang paling sering menjadi medium mereka menerima berita hoaks. (4) Kasus penipuan jual beli *online*. Berdasarkan hasil survei Kaspersky Lab di 26 negara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan korban penipuan *online* terbesar di dunia dengan 26% konsumen pernah menjadi korban. (5) Kasus prostitusi *online*. Terdapat 80 kasus prostitusi online anak dari Januari sampai September 2018. Jumlah itu paling banyak di antara kasus *trafficking* dan eksploitasi anak. Media sosial mempermudah praktik prostitusi anak.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa potensi negatif terhadap perkembangan teknologi informasi harus diikuti dengan penguatan literasi digital untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan menjelang Pemilu Tahun 2024.

10. Kerangka Teoretik

Untuk mendukung analisis terhadap pelaksanaan penguatan literasi digital guna menjaga stabilitas keamanan menjelang Pemilu Tahun 2024 dalam rangka ketahanan nasional, penulis menggunakan beberapa teori yang relevan dan pendapat dari penelitian sebelumnya antara lain:

²² Yuni Fitriani dan Roida pakpahan "Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace" Volume 20 No. 1 Maret 2020 P-ISSN 1411-8629, E-ISSN: 2579-3314: <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawal> diakses tanggal 23 Maret 2023

a. Teori Komunikasi Politik

Komunikasi politik menurut Nimmo merupakan sebuah aktivitas komunikasi, baik verbal maupun nonverbal, yang memiliki muatan-muatan politik. Sementara itu menurut Melvin L. Defleur, hal tersebut merupakan aktivitas komunikasi kaitannya dengan politik dengan modal transaksional simultan. Hal tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu adalah lingkungan fisik, situasi sosiakultural, dan hubungan sosial antarpelaku komunikasi. Sementara itu menurut Hasono Suwardi, dalam arti sempit komunikasi politik adalah setiap bentuk penyampaian pesan, baik dalam bentuk lambang-lambang maupun dalam bentuk kata-kata tertulis atau terucapkan atau dalam bentuk isyarat, yang mempengaruhi kedudukan seseorang yang ada dalam struktur kekuasaan tertentu, sementara dalam arti luar adalah penyampaian pesan, khususnya yang bermuatan info politik dari suatu sumber kepada sejumlah penerima.

Pada Taskap ini akan dianalisis sejauh mana dampak dari komunikasi politik yang terjadi pada antarelit, yang tersaji di berbagai media dan upaya literasi seperti apa yang harus dilakukan berkaitan dengan komunikasi politik.

b. Teori *National Security*

Menurut Buzan, dalam melakukan analisis terhadap *National Security* perlu memperhatikan aspek keamanan dapat dibagi menjadi 5 (lima) sektor yaitu (1) Militer yang memfokuskan pada aspek pertahanan kewan; (2) Politik yang berhubungan dengan otoritas legitimasi politik; (3) Ekonomi yang berhubungan dengan perdagangan, keuangan baik nasional maupun global; (4) Sosial/sosio-kultural berkaitan dengan hubungan sosial (identitas kolektif, kultur budaya, dan agama); (5) Lingkungan yang berkaitan hubungan antara aktivitas manusia dan lingkungannya.²³ Pada Taskap ini yang akan fokus pada aspek diluar militer.

²³ Buzan, Barry. 1997. *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

c. Teori Literasi Digital

Sebagaimana didefinisikan oleh UNESCO, literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, dan mengkomunikasikan konten yang mencakup aspek etika, kognitif, emosional, sosial, dan teknis.²⁴ Konsep literasi digital merujuk pada serta tidak bisa dilepaskan dari kegiatan literasi, seperti membaca dan menulis, serta matematika yang berkaitan dengan pendidikan. Oleh karena itu, literasi digital merupakan kecakapan (*life skills*) yang tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki sikap, berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital.²⁵

Adapun prinsip dasar pengembangan literasi digital, antara lain, sebagai berikut.²⁶

1) Pemahaman

Prinsip pertama dari literasi digital adalah pemahaman sederhana yang meliputi kemampuan untuk mengekstrak ide secara implisit dan ekspilisit dari media.

2) Saling Ketergantungan

Prinsip kedua dari literasi digital adalah saling ketergantungan yang dimaknai bagaimana suatu bentuk media berhubungan dengan yang lain secara potensi, metaforis, ideal, dan harfiah. Dahulu jumlah media yang sedikit dibuat dengan tujuan untuk mengisolasi dan penerbitan menjadi lebih mudah daripada sebelumnya. Sekarang ini dengan begitu banyaknya jumlah media, bentuk-bentuk media diharapkan tidak hanya sekadar berdampingan, tetapi juga saling melengkapi satu sama lain.

3) Faktor Sosial

²⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan "Materi Pendukung Literasi Digital" 2017 hal.8

²⁵ Ibid, hal 8

²⁶ Ibid hal. 9

Berbagi tidak hanya sekadar sarana untuk menunjukkan identitas pribadi atau distribusi informasi, tetapi juga dapat membuat pesan tersendiri. Siapa yang membagikan informasi, kepada siapa informasi itu diberikan, dan melalui media apa informasi itu berikan tidak hanya dapat menentukan keberhasilan jangka panjang media itu sendiri, tetapi juga dapat membentuk ekosistem organik untuk mencari informasi, berbagi informasi, menyimpan informasi, dan akhirnya membentuk ulang media itu sendiri.

4) Kurasi

Berbicara tentang penyimpanan informasi, seperti penyimpanan konten pada media sosial melalui metode “*save to read later*” merupakan salah satu jenis literasi yang dihubungkan dengan kemampuan untuk memahami nilai dari sebuah informasi dan menyimpannya agar lebih mudah diakses dan dapat bermanfaat jangka panjang. Kurasi tingkat lanjut harus berpotensi sebagai kurasi sosial, seperti bekerja sama untuk menemukan, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang bernilai.

d. Teori *Post-Truth*

Istilah *post-truth* pertama kali dikenalkan oleh Steve Tesich dalam tulisannya tahun 1992 yang menulis mengenai kerisauannya terhadap maraknya upaya memainkan opini publik dengan mengesampingkan data dan fakta yang objektif. Masyarakat lebih pada mencari pembenaran ketimbang kebenaran yang menjadikan media sebagai arus utama untuk membentuk opini.²⁷

e. Ketahanan Nasional

Teori ketahanan dalam penelitian ini bertindak sebagai pisau analisis dalam menggambarkan *big picture* dari permasalahan. Teori Ketahanan Nasional menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) adalah negara yang mampu menyerap guncangan dan mengbuah serta menyalurkan perubahan atau

²⁷<https://setkab.go.id/media-sosial-post-truth-dan-literasi-digital/> diakses tanggal 16 Agustus 2023

tantangan radikal sambil menjaga stabilitas politik dan mencegah kekerasan. Ketahanan nasional menunjukkan kapasitas dan legitimasi untuk mengatur populasi dan wilayahnya²⁸

f. Analisis SWOT

Analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threats*) merupakan analisis kondisi internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan ataupun eksternal yang terdiri dari peluang dan tantangan suatu organisasi yang akan digunakan untuk merancang strategi dan program organisasi. Analisis SWOT pendekatan kualitatif dikembangkan oleh Kearns. Analisis SWOT tersebut digambarkan dalam 8 kotak, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dan 4 kotak isu strategis pertemuan faktor internal dan eksternal.²⁹

11. Lingkungan Strategis

a. Lingkungan Strategis Internasional

Fenomena dan isu yang berkembang diberbagai belahan dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak dan mempengaruhi lingkungan strategis suatu negara. Masalah kemunduran demokrasi menjadi perhatian masyarakat dunia. Sebagaimana dirilis pada Hari Demokrasi Internasional tahun 2021 yang diperingati pada 15 September, hal itu menawarkan berbagai negara untuk meninjau kembali keadaan demokrasi dunia. Momen tersebut digunakan komunitas internasional untuk memberikan dukungan penuh terhadap penguatan nilai-nilai kebebasan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur adil dan transparan. Bahkan, majelis umum PBB mengeluarkan resolusi yang memfokuskan, antara lain adanya kekhawatiran di banyak negara menurunnya penghormatan dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan pers, kebebasan informasi, dan kebebasan berserikat berkumpul, yang meliputi tindakan

²⁸ Hanita, M. (2020). Ketahanan nasional: Teori, adaptasi dan strategi. Jakarta: UI Publishing.

²⁹ BPS, Analisis SWOT https://daps.bps.go.id/file_artikel/66/Analisis%20SWOT.pdf diakses tanggal 12 Februari 2023

kekerasan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.³⁰ Kondisi ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar. Masyarakat akan disajikan informasi yang sudah direkayasa sehingga berbagai hal potensi yang merugikan tidak akan disadari oleh masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi menjadi isu global berikutnya yang akan mempengaruhi lingkungan strategis. Alih-alih mendukung kemudahan dalam pelayanan publik, justru memberikan dampak yang tidak diharapkan. Maraknya fenomena “disinformasi” yang melanda negara-negara yang menganut sistem demokrasi, berupa penyebaran kebohongan yang disengaja dan secara aktif disebarluaskan khususnya melalui media sosial yang mengesampingkan fakta dan data.³¹ Kondisi ini menyebabkan keterbelahan di masyarakat sehingga muncul kelompok-kelompok yang pro dan anti pemerintahan yang berdampak pada perilaku masyarakat dalam bermedia sosial.

Di bidang ekonomi, segala kemudahan investasi, bisnis, dan jual beli secara *online* yang menjadi tren saat ini disatu sisi akan memumbuhkembangkan ekonomi kreatif dan UMKM namun disisi lain berpotensi juga terjadinya penyalahgunaan yang berpotensi terjadinya penipuan dimasyarakat, termasuk munculnya perilaku pamer kekayaan “*flexing*” yang berdampak terjadinya ketimpangan ekonomi masyarakat.

Dunia saat ini sedang disibukan oleh konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina yang melibatkan negara-negara di Eropa, serta dinamika politik luar negeri. Konflik ini telah membawa dampak secara global pada harga minyak dan pangan dunia termasuk politik.³² Berbagai informasi yang tersedia mengenai berbagai dinamika tersebut akan dibuka diruang publik dan ditanggapi dengan berbagai cara di masyarakat. Jika tidak dilakukan

³⁰ Dipna Videlia Putsanra. “Hari Demokrasi Internasional 2021: Sejarah dan Tema 15 September <https://tirto.id/hari-demokrasi-internasional-2021-sejarah-dan-tema-15-september-gjul> diakses tanggal 16 Mei 2022

³¹ Therese Pearce Laanela, “*Protecting Elections During Digital Transformasion*” disampaikan dalam seminar internasional yang diselenggarakan KPU RI Tanggal 29 Maret 2022.

³² Dandy Bayu Bramasta, Sederet Dampak Perang Rusia-Ukraina Bagi Ekonomi Indonesia <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/05/173000965/sederet-dampak-perang-rusia-ukraina-bagi-ekonomi-indonesia?page=all> diakses Tanggal 6 Mei 2022

pembatasan atau filter terhadap berbagai berita yang tidak benar, akan berpotensi menimbulkan keterbelahan dimasyarakat dan kegaduhan publik khususnya digunakan sebagai bahan untuk saling menjatuhkan lawan politik dalam Pemilu Tahun 2024.

b. Lingkungan Strategis Nasional

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki keragaman budaya dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan penduduk dengan angkatan kerja sangat besar. Hal ini patut disyukuri sebagai kekayaan yang tidak banyak dimiliki oleh negara lain di dunia. Namun di sisi lain, kekayaan yang dimiliki harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan nasional Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Berbicara mengenai Indonesia, akan ada banyak kepentingan dunia terhadap berbagai isu yang berkembang di Indonesia.

Di bidang ideologi, Indonesia harus mewaspadaikan gerakan-gerakan bernuansa radikalisme dan masuknya budaya asing yang menggerus nilai-nilai kebangsaan di masyarakat. Hal itu dapat membuat masyarakat tidak lagi *aware* terhadap nilai-nilai kebangsaan yang dimiliki Indonesia. Akibatnya, paham-paham tersebut disebarluaskan dalam media sosial dengan berbagai propagandanya yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial politik.

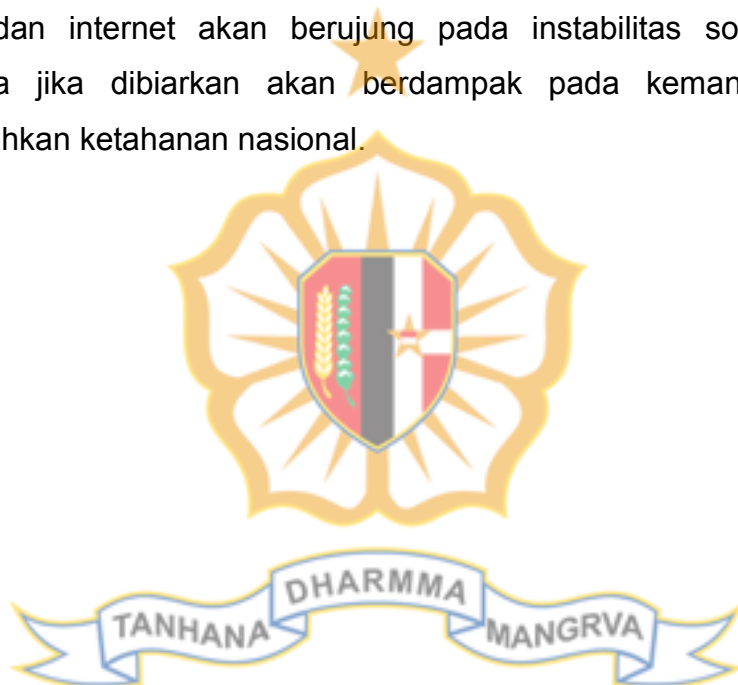
Di bidang politik, ada politik identitas. Gerakan dan aksi yang mengatasnamakan agama telah mengakar menjadi politik identitas yang destruktif yang melemahkan dan mengancam demokrasi. Pilkada DKI Jakarta dan Pemilu Tahun 2019 harus menjadi pelajaran yang patut direnungkan bersama. Polarisasi yang terjadi di masyarakat hingga saat ini akan menjadi tantangan bagi demokrasi di Indonesia kedepan.

Di bidang ekonomi, Indonesia masih berusaha untuk memulihkan kembali ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Di sisi lain, Indonesia juga sedang menyiapkan kepindahan Ibu Kota Negara yang tentunya membutuhkan keuangan negara yang cukup besar. Oleh karena itu, untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi pemerintah mengambil kebijakan yang tidak populer seperti menaikkan pajak dan harga BBM. Kebijakan pemerintah ini ditanggapi dengan berbagai cara dimasyarakat. Jika tidak dilakukan pembatasan terhadap berbagai berita yang tidak benar,

hal itu berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat. Dengan demikian, dapat tercipta kegaduhan publik, yang khususnya digunakan sebagai bahan untuk saling menjatuhkan lawan politik dalam Pemilu Tahun 2024.

Di bidang sosial budaya, masalah intoleransi menjadi tantangan tersendiri yang harus diwaspadai di tengah keberagaman baik dari suku, adat istiadat, bahasa maupun agama. Hal ini juga ditandai dengan munculnya konten-konten SARA dan diskriminatif yang akhirnya mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat.

Di bidang pertahanan dan keamanan, berbagai dampak negatif media sosial dan internet akan berujung pada instabilitas sosial politik yang tentunya jika dibiarkan akan berdampak pada keamanan negara dan melemahkan ketahanan nasional.



BAB III PEMBAHASAN

12. Umum

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia dewasa ini terus mengalami peningkatan. Negara ini memiliki ekonomi digital yang berkembang pesat, dan pemerintah secara aktif mempromosikan penggunaan teknologi untuk mengembangkan dan memodernisasi berbagai industri. Industri *e-commerce*, misalnya, telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan pemain utama seperti Tokopedia dan Bukalapak, muncul sebagai pemain kunci di pasar. Selain itu, pertumbuhan teknologi juga mendorong berkembangnya startup inovatif di Indonesia, yang memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan produk dan layanan baru ke pasar. Salah satu startup terkemuka adalah Gojek, yang telah merevolusi industri transportasi di Indonesia, menyediakan moda transportasi yang lebih nyaman dan terjangkau bagi jutaan orang.

Bidang lain yang mempromosikan penggunaan teknologi adalah politik. Dalam beberapa tahun terakhir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memanfaatkan sistem informasi secara luas untuk membantu penyelenggaraan Pemilu. Selain untuk hemat dan efisien, penggunaan teknologi informasi juga sejalan dengan semangat transparansi sehingga pekerjaan dan pelayanan yang diberikan KPU menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.³³ Adapun beberapa sistem informasi yang telah disiapkan oleh KPU untuk menghadapi Pilkada dan Pilkada 2024, antara lain Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), dan Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Semuanya terus diperbaiki dan dikembangkan dengan harapan dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memantau atau mengontrol kerja penyelenggara.³⁴

³³ KPU RI, Manfaat Teknologi Siapkan Pemilu dan Pemilih <https://www.kpu.go.id/manfaatkan-teknologi-siapkan-Pemilu-dan-pemilihan-2024> diakses tanggal 10 Mei 2023

³⁴ Ibid

Sementara menurut Kepala Pusat Kajian Kebijakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pemanfaatan teknologi digital untuk menyelenggarakan Pemilu akan mampu mengefektifkan Pemilu 2024 baik dari segi sumber daya manusia maupun finansial. Hal ini mencermati pelaksanaan Pemilu sebelumnya, yaitu tahun 2019 yang melibatkan banyak penyelenggara Pemilu dan tidak sedikit dari mereka yang jatuh sakit bahkan meninggal karena kelelahan, dan beban kerja yang terlalu berat. Untuk itu, pemanfaatan teknologi dalam Pemilu mendatang harus menjadi solusi untuk mengurangi beban kerja di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga efisiensi dapat tercapai.³⁵ Pemanfaatan teknologi digital dalam Pemilu diyakini mampu mendorong transparansi dan membuka ruang bagi masyarakat luas untuk memantau proses Pemilu secara transparan. Namun, penggunaan teknologi dalam Pemilu belum semuanya berhasil, menurut pengalaman di beberapa negara. Ada juga beberapa negara yang sudah menerapkan digital dalam Pemilu tapi belum berhasil.³⁶

Namun demikian beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian khusus dalam penerapan teknologi digital untuk menyelenggarakan Pemilu, seperti keamanan siber dan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital. Harus dipastikan tidak ada kebocoran data, baik data pemilih maupun rekapitulasi hasil Pemilu. Masih rendahnya pemahaman masyarakat kita secara keseluruhan, termasuk penggunaan media sosial yang tepat yang dapat mencegah penyebaran informasi yang salah di masyarakat.

Pada Bab ini akan membahas mengenai bagaimana pemahaman literasi digital masyarakat dalam kehidupan politik saat ini, dan pemetaan ancaman stabilitas politik dan keamanan dalam tahapan Pemilu 2024 pada aspek media sosial/digital, serta mengapa literasi digital masyarakat dalam kehidupan politik masih rendah dan rentan terpengaruh oleh berita yang menyesatkan. Pembahasan akan ditutup dengan bagaimana strategi penguatan literasi digital guna menjaga stabilitas keamanan menjelang

³⁵ BRIN, Digitalisasi Penyelenggaraan Pemilu Tingkatkan Demokrasi <https://www.brin.go.id/digitalisasi-penyelenggaraan-Pemilu-tingkatkan-kualitas-demokrasi> diakses tanggal 10 Mei 2023

³⁶ Ibid

Pemilu Tahun 2024 dalam rangka ketahanan nasional. Dalam pembahasan juga akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan yang telah dikemukakan sebelumnya serta juga mempertimbangkan data dan fakta serta perkembangan lingkungan strategis baik internasional maupun nasional.

13. Pemahaman literasi digital masyarakat dalam kehidupan politik saat ini.

Literasi digital secara singkat dapat dikatakan sebagai kecakapan manusia dalam menggunakan teknologi informasi. Kecakapan ini tidak hanya berkaitan dengan hal teknis, namun juga dari sisi etika, kognitif, emosional, sosial.

Literasi digital telah lama menjadi jawaban atas segala permasalahan yang ada di dunia maya, apalagi menjelang tahun politik seperti Pemilu. Pada bagian ini dibahas tentang gambaran pemahaman literasi digital pada masyarakat saat ini dalam kehidupan politik. Namun sebelum itu, kita perlu melihat berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Hal ini mengukur keberhasilan program-program yang dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang literasi digital. Dengan begitu, hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan suatu strategi atau kebijakan kedepan yang lebih baik.

Dalam beberapa tahun terakhir meningkatnya penggunaan teknologi digital telah menyebabkan perubahan signifikan dalam cara informasi politik disebarluaskan dan dikonsumsi. Akibatnya, literasi digital dalam politik menjadi sangat penting, untuk memastikan bahwa warga dilengkapi dengan keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi dan mengevaluasi informasi online secara kritis.

Melihat potensi ini beberapa instansi telah melakukan berbagai upaya literasi digital kepada masyarakat. Salah satunya adalah Komisi Pemilihan umum (KPU). Dalam hal ini, KPU tentu sangat menyadari bahwa literasi digital telah menjadi perhatian yang semakin penting bagi pemerintah di seluruh dunia dalam beberapa kurun waktu terakhir. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah penting dalam hal ini, dengan Komisi Pemilihan

Umum (KPU) dan pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mempromosikan literasi digital di kalangan masyarakat.

Tujuan inisiatif literasi digital adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menggunakan alat dan teknologi digital secara efektif. Alat dan teknologi digital ini memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pemungutan suara dan proses politik lainnya. KPU menyadari hal ini, dan telah menerapkan beberapa strategi untuk mendorong literasi digital di kalangan masyarakat. Salah satu strategi kunci adalah penyediaan informasi dan sumber daya digital. KPU menyediakan sumber daya digital kepada warga melalui situs web, media sosial, dan platform daring lainnya. Sumber daya ini mencakup informasi tentang prosedur pemungutan suara, undang-undang Pemilu, dan kandidat.

Dengan memberikan akses mudah kepada warga terhadap sumber daya tersebut, KPU berharap dapat menciptakan pemilih yang lebih terinformasi dan melek digital. Inisiatif penting lainnya adalah implementasi program pelatihan digital. KPU menyelenggarakan sesi pelatihan dan lokakarya untuk mengedukasi masyarakat tentang penggunaan teknologi digital dalam pemungutan suara dan proses politik lainnya. Program pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan warga dalam menggunakan alat dan teknologi digital, sehingga mendorong masyarakat yang lebih melek digital.

KPU juga telah bekerja untuk meningkatkan infrastruktur digital di Indonesia. Ini termasuk perluasan akses internet berkecepatan tinggi di seluruh negeri, serta pengembangan *platform* pemungutan suara digital. Inisiatif-inisiatif ini sangat penting untuk memastikan bahwa warga dapat dengan mudah mengakses sumber daya digital dan berpartisipasi dalam proses politik. Tegasnya, KPU di Indonesia telah menyadari pentingnya literasi digital dan telah mengambil langkah penting untuk mempromosikannya kepada masyarakat.

Penyediaan informasi dan sumber daya digital, program pelatihan digital, dan peningkatan infrastruktur digital adalah inisiatif penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih melek digital. Dengan demikian, KPU

memastikan warga negara memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif. KPU dan pemerintah daerah berkontribusi pada pemilih yang lebih terinformasi dan terlibat, dan hal ini sangat penting untuk demokrasi yang sehat. Misinformasi atau hoaks tentang penyelenggara Pemilu dapat menurunkan kepercayaan publik dan mempengaruhi partisipasi masyarakat. Untuk menghindari hoaks, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan seluruh lapisan masyarakat.

Ketua KPU Indonesia mengatakan, pelaksanaan pilkada dan Pemilu sering ditemukan banyaknya hoaks yang tersebar tentang penyelenggara Pemilu, mulai dari kotak suara yang dianggap berbahaya, surat suara dari China dan warga asing yang datang dan ikut mencoblos, hingga informasi bohong terkait Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang akan memenangkan salah satu pasangan calon. Lebih lanjut menurutnya, informasi bohong seperti ini jika dibiarkan bisa berdampak pada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU adalah melalui penyelenggaraan kegiatan seminar-seminar tentang Peduli Suara Pemilu dan Pilkada untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak hoaks dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

KPU menyampaikan pula perlunya menginformasikan kepada masyarakat bahwa jika menerima hoaks harus segera diklarifikasi, baik oleh KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota, semua harus segera membantu untuk menghentikan informasi tersebut.³⁷ Sementara itu, pakar ilmu politik dari Universitas Gadjah Mada, Abdul Gaffar Karim dalam Ramayanti (2018), memaparkan langkah-langkah melawan maraknya hoaks dalam rangka penyelenggaraan pilkada dan pilkada. Salah satunya adalah pemilik lembaga informasi dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap dan mudah diakses. Selanjutnya, KPU selalu memberikan informasi yang lengkap dan mudah diakses. Selain KPU, individu atau masyarakat harus menyaring informasi. Untuk melakukan ini, ada dua jalur yang harus diikuti, termasuk literasi, karena semakin baik memahaminya, semakin mudah

³⁷ KPU RI, Tangkal Hoaks Dengan Perkuat Literasi. <https://www.kpu.go.id/tangkal-hoaks-dengan-perkuat-literasi-digital> diakses tanggal 11 Mei 2023

mengidentifikasi hoaks dan berpikir kritis dengan menyaring informasi yang benar.³⁸

Dalam tulisannya, Viola Reininda menjelaskan bahwa hoaks mungkin saja beredar sebagai bagian strategi kampanye Pemilu Tahun 2024. Menyikapi kemungkinan tersebut, ada empat hal perlu dilakukan:³⁹

- Pertama, perlu dirumuskan rumusan yang komprehensif mengenai kampanye media sosial dan manajemen kampanye Pemilu di tingkat hukum.
- Kedua, harus dilakukan investigasi menyeluruh terhadap akun-akun penyebar hoaks dan ujaran kebencian terhadap caleg agar jika terbukti ada kaitannya bisa diberikan sanksi hukuman sebagai pencegah.
- Ketiga, penguatan koordinasi dan sinergitas antarinstansi.
- Keempat, penyelenggara Pemilu harus mengaktifkan pusat-pusat informasi untuk memudahkan akses publik terhadap informasi resmi terkait Pemilu.

Instansi berikutnya yang juga memegang peranan penting dalam meningkatkan pemahaman digitalisasi kepada masyarakat adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sama seperti KPU, Bawaslu juga melihat potensi bahwa dengan meningkatnya penggunaan teknologi dan Internet dalam kehidupan kita sehari-hari telah memungkinkan bentuk-bentuk keterlibatan dan partisipasi baru, termasuk dalam ranah politik. Bawaslu Indonesia mengakui pentingnya peran literasi digital dalam mendorong proses Pemilu yang adil dan transparan. Untuk itu, telah dilaksanakan berbagai kegiatan literasi digital untuk mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam proses Pemilu.

Salah satu cara Bawaslu Indonesia mendorong literasi digital adalah melalui penyediaan informasi proses dan prosedur kePemiluan melalui website dan platform media sosial. Hal ini memungkinkan akses informasi yang lebih luas dan partisipasi yang lebih besar oleh semua warga negara. Selain itu, penggunaan platform online memfasilitasi penyebaran informasi

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

yang relevan hampir secara *real time*, memungkinkan warga untuk mengetahui perkembangan terbaru dalam proses Pemilu.

Inisiatif penting lainnya dari Bawaslu Indonesia adalah penyediaan program pelatihan literasi digital. Program-program ini bertujuan untuk membekali warga dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menavigasi lanskap digital dan terlibat dalam wacana politik secara online. Hal ini sangat penting mengingat meningkatnya prevalensi berita palsu dan disinformasi di ranah digital, yang dapat berdampak signifikan pada hasil Pemilu. Dengan mempromosikan literasi digital, Bawaslu Indonesia membantu memastikan bahwa warga negara dapat menilai informasi secara lebih baik dan membuat keputusan yang tepat.

Selain itu, Bawaslu Indonesia telah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses Pemilu. Misalnya, telah dikembangkan sistem pengaduan online yang memungkinkan warga untuk melaporkan penyimpangan atau pelanggaran yang mereka amati selama proses Pemilu. Laporan-laporan ini dipantau secara ketat oleh Bawaslu Indonesia, dan tindakan yang tepat diambil jika diperlukan. Hal ini membantu memastikan bahwa proses Pemilu adil dan transparan, dan bahwa integritas proses demokrasi terjaga.⁴⁰

Untuk tegasnya, lanskap digital telah menghadirkan peluang dan tantangan bagi proses Pemilu. Bawaslu Indonesia menyadari pentingnya literasi digital dalam mendorong Pemilu yang adil dan transparan dan telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk mendorong hal tersebut. Dengan memberikan informasi secara *online*, melakukan program pelatihan literasi digital, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi. Bawaslu Indonesia memberdayakan warga untuk terlibat dalam proses demokrasi dan memastikan proses Pemilu yang adil dan transparan. Bawaslu akan memaksimalkan pengawasan dalam bentuk jaringan. Tujuannya untuk mencegah munculnya konten-konten seperti hoaks dan

⁴⁰ Bawaslu, Tingkatkan Literasi Digital Bawaslu Susun Strategi Pengawasan Siber. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/tingkatkan-literasi-digital-bawaslu-susun-strategi-pengawasan-siber>. diakses tanggal 11 Mei 2023

ujaran kebencian di media sosial agar tidak memecah belah masyarakat selama Pemilu Tahun 2024.

Selain Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman literasi digital bagi masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mencanangkan Gerakan Literasi Digital (GMD) sebagai salah satu cara untuk menggalakkan literasi digital dalam pendidikan. Mereka telah memperkenalkan Kurikulum Komprehensif Digital (KBB) yang memasukkan mata pelajaran literasi digital dalam kurikulum nasional untuk sekolah dasar dan menengah. Pemerintah juga telah membuat berbagai program untuk meningkatkan literasi digital bagi orang dewasa, seperti *Digital Talent Scholarship* (DTS) dan Gerakan Nasional TIK (Gernas TIK). Melalui inisiatif ini, warga dapat memperoleh keterampilan literasi digital dan berkontribusi pada pengembangan masyarakat digital.

Pemerintah daerah juga berkontribusi terhadap literasi digital di Indonesia. Misalnya, pemerintah Jawa Barat telah meluncurkan program e-literasi bernama *weBisasaja*. Program ini memberikan pelatihan gratis bagi siswa SMA, pendidik, dan masyarakat umum tentang cara menggunakan internet secara efektif dan bertanggung jawab. Selain itu, Pemerintah Kota Semarang telah mencanangkan program *Smart City* yang fokus memberikan kemudahan akses layanan informasi digital kepada warganya. Program ini mempromosikan literasi digital di kalangan warga, membuat mereka lebih nyaman dengan teknologi digital.

Penguatan pemahaman literasi digital juga dilakukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Kementerian Informasi dan Komunikasi juga menyelenggarakan pengarusutamaan digital sektor pemerintahan untuk ASN. ASN yang kini menjadi pelayan publik harus memperhatikan perkembangan digital. Apalagi dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan, ASN juga harus bisa mengenali informasi yang salah atau berita bohong.

Selain itu, aspek negatif ruang digital harus disikapi dengan tepat. Misalnya PNS harus aktif dalam mensiasati ruang digital. Selain kemampuan

mengoperasikan komputer, mereka juga memiliki keterampilan digital yang canggih. ASN harus selalu menjaga netralitasnya di ruang digital. Seorang ASN harus menjaga profesionalitasnya, dan salah satu kriteria pelayanan publik adalah kepuasan publik baik dalam ruang fisik maupun digital.

Bahkan, ASN yang makin paham akan dunia digital diharapkan dapat mendorong aparatur pemerintah menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam kehidupan digital. Selain itu, ASN dapat fokus mendukung transformasi digital dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terkait literasi digital dikalangan ASN, terdapat materi literasi digital yang bermuara pada upaya transformasi digital bagi aparatur negara dan juga mengarahkan ASN pada netralitas menyambut tahun politik. Digitalisasi juga merupakan motor penggerak untuk meningkatkan kinerja ASN secara umum. Pandemi Covid-19 telah mengubah cara ASN beroperasi lebih ke arah digitalisasi. Maka tantangan baru berikutnya yang dihadapi adalah Pemilu Tahun 2024.

Literasi digital bidang pemerintahan di lingkungan ASN merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program peningkatan kemampuan digital Indonesia. Program ini merupakan bagian dari peningkatan literasi digital 50 juta masyarakat Indonesia pada tahun 2024. Upaya lebih lanjut untuk meningkatkan literasi digital sangat diperlukan untuk menciptakan ruang digital yang kondusif dan positif.

Menurut McCurdy dalam Piliang (2012), salah satu cara untuk memastikan partisipasi politik yang sukses di era digital adalah melalui penyebaran informasi secara massal tentang kegiatan politik di berbagai platform media. Selain itu, sangat penting untuk menekankan tidak hanya aspek teknis literasi media digital tetapi juga implikasi sosial dan politiknya.

Hal ini dapat dilakukan melalui program pendidikan literasi digital yang komprehensif yang memungkinkan individu memahami potensi dampak media digital terhadap hak dan tanggung jawab demokrasi mereka, serta mempromosikan kebebasan berbicara, keragaman media, dan hak hak kewarganegaraan lainnya dibidang politik secara digital. Aspek penting lainnya dari literasi digital dalam politik adalah kemampuan untuk mengenali dan melawan disinformasi dan berita palsu. Seiring lanskap digital terus

berkembang, penting bagi pemerintah dan organisasi lain untuk memprioritaskan pengembangan literasi digital di antara warga negara, khususnya dalam keterlibatan politik, untuk memastikan masyarakat yang lebih terinformasi dan demokratis.

Seiring dengan peningkatan pengguna internet di Indonesia, hal itu perlu diiringi dengan kondisi literasi digital yang baik, agar mencegah terjadinya dampak negatif akibat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di tengah masyarakat. Namun demikian, menurut Peneliti INDEF, tingkat literasi digital di Indonesia hanya sebesar 62%. Jumlah tersebut dibawah rata-rata negara ASEAN yang mencapai 70%, bahkan di negara Korea tingkat literasi digital masyarakatnya sebesar 97%. Adapun kerangka lain dalam pengukuran literasi digital adalah indeks literasi digital. Indeks literasi digital diterbitkan oleh Kemenkominfo dengan menitikberatkan pada empat pilar yaitu kecakapan digital (*digital skill*), etika digital (*digital ethics*), keamanan digital (*digital safety*), dan budaya digital (*digital culture*) dalam skala 1–5.

Digital skill atau disebut juga kecakapan digital adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengetahui, memahami dan mengoperasikan pirantik TIK dalam kehidupan sehari-hari. *Digital ethics* merupakan kemampuan seseorang untuk mencotohkan, menyadari, menyesuaikan diri, berpikir rasional, menimbang dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam interaksi dengan teknologi. *Digital safety* merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, mengenali, memolakan, mencegah dan meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Sementara itu, *Digital culture* merupakan kemampuan seseorang dalam menguraikan, membiasakan, membaca, memeriksa membangun wawasan kebangsaan, nilai Ideologi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dalam interaksi dengan TIK.

Untuk lebih tegasnya, saat ini telah terjadi peningkatan peran digital dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya penggunaan teknologi digital telah menyebabkan perubahan signifikan dalam cara informasi politik disebarluaskan dan dikonsumsi. Akibatnya, literasi digital dalam politik

menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa warga dilengkapi dengan keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi dan mengevaluasi informasi *online* secara kritis.

Secara keseluruhan, mencapai literasi digital dalam politik sangat penting untuk memastikan masyarakat demokratis yang lebih terinformasi dan terlibat. Selanjutnya, pengembangan literasi digital di kalangan warga negara harus diperlakukan sebagai prioritas oleh pemerintah dan organisasi terkait lainnya untuk mendorong partisipasi aktif dalam proses politik sambil mempromosikan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

Menurut Yudha Pradana dalam Sulianta (2020), terdapat empat prinsip dasar dalam literasi digital, yaitu :

- Pemahaman, yaitu saat orang memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang disajikan di Internet sebagai sarana komunikasi, baik secara implisit maupun eksplisit.
- Adanya saling ketergantungan dan saling melengkapi dari informasi yang disajikan.
- Peran sosial.
- Kurasi atau kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan menyimpan informasi untuk dipersepsi sebagai pesan positif.

Saat ini kemampuan masyarakat untuk memahami informasi dalam bidang digital yang berkembang di internet semakin hari semakin meningkat. Masyarakat sudah mulai bisa menyaring informasi mana yang layak dikonsumsi dan mana yang kemudian tergolong informasi negatif. Hal itu terlihat jelas dari hasil Indonesia *Digital Knowledge Index 2021* yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika, bekerja sama dengan *Katadata Insights Center* (KIC).

Berdasarkan data dari Kemenkominfo, Indeks Literasi Digital masyarakat Indonesia pada tahun 2021 mencapai angka 3,49 dari skala 1 sampai 5, naik dari tahun sebelumnya sebesar 3,46. Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 diukur melalui survei tatap muka terhadap 10.000 responden di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Karakteristik subjek survei adalah pengguna internet berusia antara 13 hingga 70 tahun.berada pada posisi 3,49 atau pada level “sedang”. Pada tahun 2022, Indeks Literasi Digital

Indonesia mengalami kenaikan menjadi 3,54 atau naik sebanyak 0,05 poin, sementara dibandingkan dengan data tahun 2020 angkanya naik 0,08 poin.⁴¹

Pada aspek *digital skill* mengalami peningkatan dari 3,44 poin pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 menjadi 3,52 poin. Aspek *digital ethics* juga mengalami kenaikan dari 3,53 poin menjadi 3,68 poin pada tahun 2022. Selanjutnya, dari aspek *digital safety* naik dari 3,10 poin menjadi 3,12. Namun demikian mengalami penurunan pada aspek *digital culture* yaitu dari 3,9 poin menjadi 3,84 poin pada tahun 2022.⁴² Adapun daerah dengan 10 Indeks literasi digital tertinggi adalah sebagai berikut:

- Daerah Istimewa Yogyakarta dengan skor 3,64
- Kalimantan Barat dengan skor 3,64
- Kalimantan Timur dengan skor 3,62
- Papua Barat dengan skor 3,62
- Jawa Tengah dengan skor 3,61
- Jawa Barat dengan skor 3,60
- DKI Jakarta dengan skor 3,59
- Kepulauan Riau dengan skor 3,59
- Jawa Timur dengan skor 3,58

Mengacu pada Survei Literasi Digital Kemenkominfo 2022 kegiatan masyarakat di internet sebagian besar dilakukan dalam rangka bersosialisasi, akses hiburan, pekerjaan dan mengakses layanan. Dalam bersosial masyarakat cenderung melakukan kegiatan berkomunikasi lewat pesan singkat, dan media sosial, sementara dari aspek hiburan masyarakat cenderung banyak melakukan akses video atau musik, mencari informasi, belanja online dan mengakses portal berita. Secara rinci masyarakat paling banyak mengakses berita atau informasi *pertama* melalui media sosial, *kedua* televisi, dan *ketiga* berita online. Tercatat terdapat 72,6% masyarakat menjadikan media sosial menjadi sumber informasi dan berita mereka. Berkaitan dengan itu juga terdapat data yang menunjukkan masyarakat masih mempercayai media sosial pada posisi kedua sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya.

⁴¹ <https://indonesiabaik.id/infografis/indeks-literasi-digital-indonesia-meningkat-lagi> diakses pada 12 Mei 2023

⁴² *Ibid*

Dalam survei tersebut juga disebutkan bahwa sebagian besar masyarakat (53%) sering kali tidak mempermasalahkan pengutipan berita dengan sumber anonim atau bahkan tidak ada sumber yang jelas sama sekali. Sementara itu, dalam hal menanggapi berita hoaks, terjadi dinamika tersendiri. Masyarakat cenderung mempercayai berita hoaks yang akan membawa kesejahteraan kepada mereka, seperti halnya berita hoaks adanya Subsidi 75GB dari Kemendikbud untuk siswa dan guru beberapa waktu lalu. Selain itu, juga terkait dengan berita Covid-19 dimana masyarakat cenderung mempercayai berita yang salah karena keterbatasan pemahaman. Sementara itu, berkaitan dengan isu politik masih terdapat masyarakat mempercayai hoaks berkaitan dengan isu politik meskipun jumlahnya cenderung kecil. Dari aspek sosial media *platform* Facebook masih menjadi sosial media tertinggi yang banyak berita hoaks disusul media *online* dan Whatsapp.⁴³ Pengukuran Indeks Literasi Digital ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengetahui kondisi literasi digital di Indonesia, tetapi juga untuk memastikan bahwa upaya literasi digital masyarakat lebih tepat sasaran.

Terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah, mempromosikan literasi digital masih menjadi tantangan yang signifikan di Indonesia. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya infrastruktur digital dan terbatasnya ketersediaan teknologi dan pendidikan di daerah tertentu. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah dapat berinvestasi dalam menyediakan infrastruktur dan peralatan yang lebih baik untuk pembelajaran digital. Dengan menyediakan akses ke teknologi digital dan internet berkecepatan tinggi, pemerintah dapat memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan untuk memperoleh keterampilan literasi digital.

Bukti bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia berupaya mempromosikan literasi digital di kalangan warga negara, antara melalui berbagai inisiatif yang dilakukan seperti Gerakan Literasi Digital, Beasiswa Bakat Digital, dan program e-literasi, berbagai program tersebut mendorong warga memperoleh keterampilan digital yang penting untuk

⁴³ Indek Literasi Digital 2022 Kemenkominfo, 2023
<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/ReportSurveiStatusLiterasiDigitalIndonesia2022.pdf>
diakses pada 13 Mei 2023

berkontribusi pada pengembangan masyarakat digital. Meskipun ada tantangan, seperti kurangnya infrastruktur digital, ada solusi yang tersedia yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Hasil Survei Indeks Literasi Digital Nasional 2022 yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan *Katadata Insights Center* (KIC) mengungkapkan literasi digital masyarakat Indonesia sebesar 3,54 dari 5,00. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi digital di Indonesia cukup tinggi. Menurut studi terbaru dalam Manurung (2020), tingkat literasi digital di Indonesia sangat bervariasi di berbagai kelompok usia dan wilayah. Sebuah survei tahun 2019 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyedia Layanan Internet Indonesia menemukan bahwa hanya 12,5% dari total populasi yang memiliki keterampilan digital tingkat lanjut, sementara lebih dari separuh populasi (54,68%) memiliki literasi digital yang rendah atau tidak ada sama sekali. Hal ini menyoroti kebutuhan mendesak akan program dan inisiatif untuk meningkatkan literasi digital di Indonesia, khususnya di komunitas yang kurang terlayani. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa terminologi yang digunakan untuk literasi digital bervariasi di berbagai wilayah dan budaya. Oleh karena itu, setiap upaya untuk meningkatkan literasi digital harus memperhatikan konteks lokal dan menggunakan strategi yang relevan dengan budaya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, sangat penting untuk menyadari bahwa literasi digital mencakup berbagai keterampilan di luar kompetensi teknologi belaka. Keterampilan ini meliputi pemikiran kritis, literasi informasi, dan pertimbangan etis saat menggunakan *platform digital*.

Oleh karena itu, penting untuk memperluas definisi dan ruang lingkup literasi digital di Indonesia untuk mencakup keterampilan yang lebih luas ini. Upaya peningkatan literasi digital di Indonesia harus memprioritaskan pemerataan akses teknologi dan program pelatihan di semua kelompok umur dan wilayah. Selain itu, kolaborasi antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan organisasi nirlaba diperlukan untuk mengatasi kesenjangan literasi digital di Indonesia secara efektif. Pada akhirnya, peningkatan literasi digital di Indonesia dapat mengarah pada masyarakat yang lebih inklusif dan terhubung, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan tenaga kerja

negara secara keseluruhan. Meskipun demikian beberapa penelitian menunjukkan pula bahwa kondisi literasi digital di Indonesia memprihatinkan, sebagian besar penduduk memiliki keterampilan digital yang rendah atau tidak sama sekali, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat saat ini.

Literasi digital telah menjadi keterampilan penting di dunia saat ini. Data Literasi Digital Indonesia adalah panduan penting bagi individu dan organisasi dalam mengembangkan keterampilan literasi digital mereka untuk secara efektif menavigasi lanskap digital yang semakin meningkat. Selain itu, seperti disampaikan Kemendikbud, materi Pendukung Literasi Digital yang dirilis bersamaan dengan Dokumen Literasi Digital Indonesia menggarisbawahi betapa pentingnya literasi digital dalam sistem pendidikan modern di Indonesia.

Pelaksanaan pendidikan mengenai literasi digital, bagaimanapun, menghadapi tantangan seperti kendala ekonomi dan keterbatasan kualitas dan kuantitas infrastruktur TIK. Tantangan-tantangan ini harus diatasi untuk memastikan bahwa semua individu dilengkapi dengan keterampilan literasi digital yang diperlukan untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan berkontribusi secara efektif bagi pembangunan nasional. Selain itu, Dokumen Literasi Digital Indonesia berfungsi sebagai kerangka komprehensif bagi pendidik untuk mengintegrasikan teknologi digital ke dalam rencana pelajaran dan kurikulum mereka. Diyakini bahwa dengan memasukkan teknologi digital ke dalam pendekatan pendidikan, pendidik dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil belajar.

14. Pemetaan ancaman stabilitas politik dan keamanan dalam tahapan Pemilu 2024 pada aspek media sosial/digital

a. Hubungan/pengaruh tahapan Pemilu dengan stabilitas keamanan

Pemilu adalah komponen mendasar dari masyarakat demokratis, memberikan warga negara kesempatan untuk berpartisipasi dalam membentuk masa depan negara mereka. Namun, Pemilu juga dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas dan keamanan suatu negara.

Pemilu 2024 akan segera tiba dan tahapan-tahapan Pemilu sedang berlangsung, sehingga berbagai pemangku kepentingan harus mampu membentuk dan menyiapkan lingkungan strategis dalam keadaan yang stabil. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tahapan Pemilu telah berlangsung sejak Juni 2022. Tahapan tersebut secara umum terdiri dari tahapan administrasi, pendaftaran peserta, verifikasi, masa kampanye, masa tenang, rekapitulasi, hingga pengucapan sumpah dan janji bagi para peserta Pemilu.

Pada dasarnya setiap tahapan tentunya terdapat kerawanan namun tidak signifikan. Terdapat tahapan khusus yang memiliki kerawanan yang cukup tinggi diantaranya masa kampanye, masa pencalonan dan masa tenang. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang mengatakan bahwa terdapat kerawanan khususnya pada masa pencalonan peserta Pemilu, karena apabila hasil verifikasi konstituen para kandidat tersebut tidak memenuhi syarat dan pencalonannya dibatalkan maka, potensi konfliknya akan sangat nyata, baik dalam dunia maya maupun dunia nyata.⁴⁴

Selama Pemilu, ketegangan dapat meningkat karena partai politik dan kandidat bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, terkadang mengakibatkan kekerasan atau kerusuhan sipil. Hal ini dapat menimbulkan rasa tidak aman di kalangan warga, serta terganggunya layanan esensial dan kegiatan ekonomi. Selain itu, Pemilu juga dapat menimbulkan efek destabilisasi pada masyarakat miskin dengan mengganggu produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.

Untuk mengatasi kekhawatiran tentang ketidakstabilan terkait Pemilu, para ahli telah melakukan penelitian untuk mengidentifikasi bagaimana sistem dan prosedur Pemilu yang berbeda dapat memengaruhi stabilitas keamanan nasional. Sebuah studi baru-baru ini

⁴⁴ <https://perludem.org/2020/02/14/perludem-tahapan-pencalonan-pilkada-rawan-konflik/> diakses pada 13 Mei 2023

mengkaji hubungan antara jumlah partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu dan dampaknya terhadap stabilitas keamanan.

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara jumlah partai dan stabilitas keamanan nasional, khususnya di negara-negara yang sedang dalam transisi menuju demokrasi yang matang. Meskipun Indeks Kerentanan Pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu memberikan beberapa wawasan tentang keamanan Pemilu, hubungannya dengan jumlah partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu tidak sepenuhnya jelas. Mengingat potensi dampak Pemilu terhadap stabilitas keamanan nasional, sangat penting untuk mengambil tindakan pencegahan dan tindakan yang diperlukan untuk memastikan keamanan selama periode tertentu.

Selanjutnya, bentuk potensi kerawanan yang mungkin timbul dalam tahapan Pemilu Tahun 2024 pada aspek media sosial/digital adalah berkaitan dengan berita hoaks, misinformasi, disinformasi dan politik identitas. Dalam pemetaan kerawanan digital/media sosial pada pelaksanaan Pemilu 2024 Tahun dapat dibagi dalam beberapa isu strategis sebagai berikut:

- Potensi polarisasi masyarakat;
- Berkembangnya politik identitas residu Pemilu Tahun 2019;
- Algoritma media sosial yang cenderung bersifat *echo chamber*;
- Persebaran dan amplifikasi informasi yang bersifat *hate speech* hoaks, disinformasi, dan misinformasi.

Potensi polarisasi masyarakat dalam Pemilu sebetulnya sering kali terjadi pada penyelenggaraan pesta demokrasi, namun hal ini menguat setelah Pilpres 2019 dan Pilkada DKI 2017. Berkaca dari contoh tersebut, polarisasi politik masih cenderung didorong oleh sentimen agama. Polarisasi dengan sentimen agama nampaknya juga belum dapat dihindarkan dari pelaksanaan Pemilu 2024. Beberapa pihak menilai hal ini akibat dari desain konstitusi yang mana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus meraih lebih dari 50% suara, pernyataan ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari. Sementara itu, Guru Besar Psikologi Politik UI, Hamdi Muluk

mengatakan bahwa polarisasi pada Pemilu Tahun 2019 kemungkinan besar akan terulang di Pemilu Tahun 2024.

Hal tersebut terjadi akibat pengelompokan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di posisi dua kutub yang berbeda. Fenomena narasi *cebonk vs kampret* yang merupakan bentuk polarisasi akibat sentimen agama cenderung akan mengemuka, ditambah lagi dengan isu ketidakpuasan dengan pemerintah maka akan menambah kutub polarisasi tersebut ditengah masyarakat.⁴⁵

Dilihat dari latar belakang sejarahnya, Indonesia sudah penuh dengan perbedaan agama-politik. Sebut saja tokoh politik seperti Soekarno yang beraliran nasionalis dan M. Natsir yang lebih agamis. Menurut penelitian Herbert Feith dan Lance, tradisi Islam dan Hindu-Jawa yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Barat memunculkan partai-partai seperti PKI yang pro komunis, PNI nasionalis radikal, PSI pro sosialis, serta NU dan Masyumi yang agamis. Sementara itu, perbedaan parpol berdasarkan ideologi diturunkan, seperti PDIP dan Gerindra yang cenderung nasionalis proteksionis, Golkar, Nasdem dan Demokrat yang cenderung nasionalis pasar bebas, serta PKB, PKS, PPP yang cenderung menjadi nasionalis proteksionis, beragama. Dalam konteks ini, potensi ancaman polarisasi dan eksekusi negatif dapat dicegah dengan kearifan para pegiat partai dalam perselisihan politik.⁴⁶

Selanjutnya, setelah kita melihat secara fundamental potensi polarisasi yang mana hal tersebut dapat mengarah kepada konflik horizontal yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan maka kita beranjak pada katalisator lainnya yaitu media. Peran media saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Media sosial sejak awal menjadi tempat dimana amplifikasi berita palsu dan hoaks dilakukan. Aktivitas tersebut dilakukan dalam berbagai platform dengan berbagai format. Di sisi lain, terdapat aspek yang memperparah amplifikasi media sosial tersebut yaitu adanya algoritma

⁴⁵ <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/19/polarisasi-masyarakat-berdasarkan-agama-berpotensi-terjadi-lagi-Pemilu-2024> diakses pada 13 Mei 2023

⁴⁶ *Ibid* halaman 11

media sosial yang cenderung membuat orang akan lebih percaya diri dengan apa yang diyakininya.

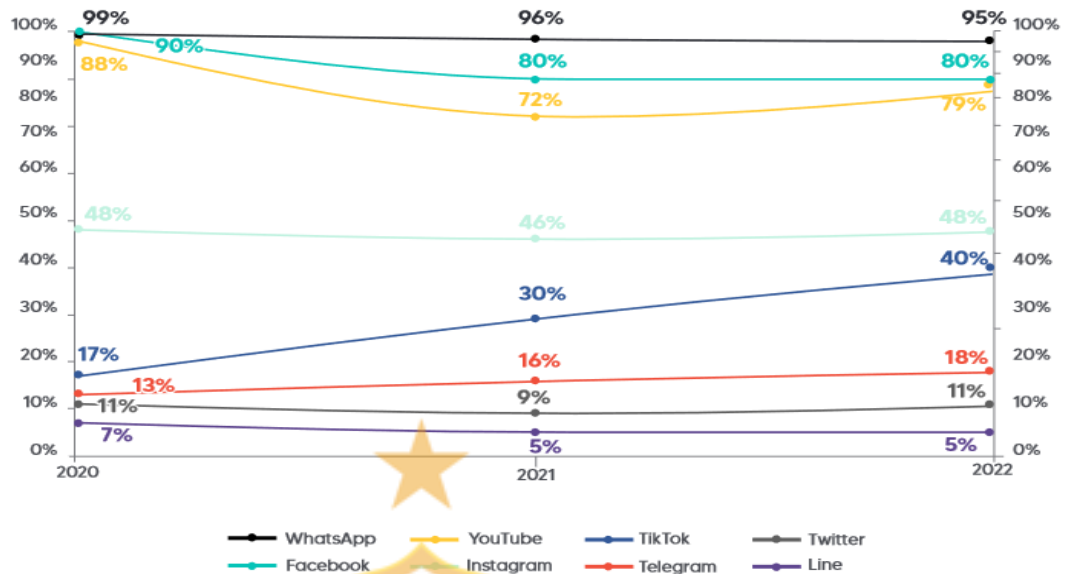
Penjelasannya acap kali bermedia sosial, kita seringkali memberi *like* atau mencari informasi tentang sesuatu. Secara tidak sadar, setelah kita mencari informasi tersebut atau memberikan *like* pada sesuatu yang kita sukai, maka *postingan* yang terkait pasti akan muncul dalam *explore* media sosial kita. Hal ini dibuat agar media sosial menjadi nyaman dengan konten yang kita sukai. Berkaitan dengan hal itu, peneliti MIT bernama Marshall Van Alstyne dan Erik Brynjolfsson mengatakan bahwa terdapat potensi bahaya ketika kita hanya berinteraksi dengan individu yang menganut nilai serupa dengan kita.

Algoritma tersebut pada akhirnya akan membawa seseorang bertemu dengan seseorang yang berpikir sama dan di sinilah muncul kerawanan akibat terlalu percaya dengan pandangan diri sendiri dan cenderung menyalahkan pandangan orang lain. Praktik tersebut sangat berbahaya apabila berkaitan dengan hal politik, karena dapat menciptakan bias informasi, segregasi dan polarisasi.⁴⁷

Selanjutnya, terkait dengan perkembangan media sosial setiap *platform* berlomba untuk dapat menarik pengguna sebanyak-banyaknya. Media sosial Tiktok menjadi media sosial yang mengalami kenaikan pengguna yang cukup signifikan, sementara media sosial lainnya cenderung stagnan bahkan ada yang turun, hal ini tersaji dalam grafik berikut.

⁴⁷ https://www.kompasiana.com/bobby18864/6057b36ad541df20c824a9c3/alogaritma-medsos-menjebak-kita-dalam-echo-chamber-yang-berbahaya?page=2&page_images=1 diakses pada 13 Mei 2023

Gambar 2
Data Pengguna Media Sosial



Sumber: Kemenkominfo, 2023

TikTok merupakan media sosial dari Tiongkok yang berfungsi sebagai media untuk membagikan video pendek singkat. Layaknya media sosial lainnya, TikTok juga memiliki algoritma yang bersifat *echo chamber* dan *filter bubble*. Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, menyatakan bahwa pihaknya memprediksi bahwa media sosial TikTok menjadi media yang digemari masyarakat dan berpotensi menjadi wadah perang narasi untuk dapat menarik simpati masyarakat. Salah satu yang menjadi kerawanan adalah terkait dengan penyebaran hoaks, *hate speech*, dan politik identitas. Format TikTok yang menjadi media video singkat cenderung lebih atraktif singkat dan mudah dipahami masyarakat.⁴⁸

Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan langkah-langkah dan protokol keamanan yang efektif yang dikelola oleh pemerintah dan sektor swasta. Selain itu, sangat penting untuk mempromosikan Pemilu yang transparan dan adil melalui langkah-langkah seperti pendidikan pemilih, liputan media yang tidak memihak, dan komisi Pemilu yang independen.

⁴⁸ <https://politik.rmol.id/read/2023/03/02/565369/lp3es-tiktok-potensi-jadi-wadah-penyebaran-hoax-dan-hate-speech-Pemilu-2024> diakses pada 13 Mei 2023

Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat memastikan bahwa Pemilu tidak menjadi ancaman bagi keamanan dan stabilitas nasional, melainkan menjadi kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam membentuk masa depan negaranya. Selain itu, dampak pemilihan presiden terhadap stabilitas ekonomi tidak dapat diabaikan. Penelitian telah menunjukkan bahwa ada hubungan antara hasil pemilihan presiden dan dampaknya terhadap keuangan negara dan pasar ekuitas.

Sementara menurut Herwyn JH Malonda, anggota Bawaslu Indonesia, lembaga preventif seperti Bawaslu harus dioptimalkan sesegera mungkin. Pasalnya, Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 memiliki lubang dari sisi keamanan. Lebih lanjut menurutnya, aspek keamanan dan ketertiban masyarakat bisa menjadi buruk karena gagalnya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.

Pengawas Pemilu harus mampu menciptakan kondisi yang stabil dimana masyarakat dapat terpuaskan, atau minimal masyarakat dapat mengandalkan kerja Bawaslu melalui pengawasan, penyidikan, dan penindakan. Jika masyarakat tidak puas dengan proses atau hasil dari keputusan yang dibuat oleh penyelenggara Pemilu, masyarakat dapat turun tangan di bidang penegakan hukum.

b. Dampak negatif dan positif penggunaan media sosial

Dalam Pemilu modern, media sosial memainkan peran penting. Hal ini karena media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk berbagi informasi dan mengkomunikasikan pandangan politik kepada massa. Namun, meskipun media sosial memberikan manfaat besar dalam Pemilu, penggunaannya dapat menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Udanor dalam Manurung (2020) menunjukkan bagaimana analisis media sosial dapat memberikan dampak yang signifikan pada pengelolaan pemerintahan di negara-negara berkembang. Penelitian yang dilakukan oleh Udanor menggunakan teknik SMA untuk menganalisis tweet-tweet terkait

Pemilu di Nigeria pada tahun 2015. Teknik SMA yang digunakan meliputi analisis tren dan analisis sentimen untuk mengetahui makna dari komentar-komentar tersebut.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa analisis media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk menganalisis opini publik terkait isu Pemilu dan dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih baik.

Selain itu, dampak media sosial dalam Pemilu juga terlihat di Singapura selama Pemilu Tahun 2011 dan kasus SMRT. Di Asia Tenggara, khususnya di Singapura selama Pemilu Tahun 2011 dan kasus SMRT, dampak media sosial terhadap Pemilu juga terlihat. Selain itu, maraknya kampanye online selama Pemilu Tahun 2018 di Brasil menyebabkan taktik agresif yang digunakan oleh kandidat seperti Bolsonaro di platform media sosial. Jelas bahwa media sosial telah menjadi alat yang ampuh untuk komunikasi dan analisis politik.

Namun, hal itu harus didekati dengan hati-hati dan dikelola dengan baik untuk mencegah konsekuensi negatif pada tata kelola. Disinformasi dan teknologi manipulatif, sebagaimana dinyatakan oleh D. Tambini dalam kajiannya "Kekuatan Media Sosial dan Legitimasi Pemilu", dapat menjadi ancaman terhadap integritas Pemilu dan kualitas informasi secara umum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan penyelenggara Pemilu untuk mengenali potensi dampak media sosial terhadap Pemilu dan mengambil tindakan proaktif untuk mengelola penggunaannya dengan cara yang bertanggung jawab dan etis.

Untuk tegasnya, dengan kemampuannya untuk mempengaruhi opini publik dan menyediakan sarana komunikasi bagi kandidat politik, media sosial telah menjadi aspek penting dalam Pemilu modern. Pengelolaan dan analisis media sosial yang tepat dapat memberikan wawasan berharga tentang opini publik terkait isu Pemilu, yang pada gilirannya dapat membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih baik. Namun, potensi dampak negatif dari media sosial, termasuk disinformasi dan manipulasi, tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu,

sangat penting bagi pemerintah untuk menyadari potensi risiko ini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengelola penggunaan media sosial secara efektif selama Pemilu.

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan perubahan pada masyarakat. Munculnya media sosial menyebabkan pola perilaku masyarakat mengalami perubahan budaya, etika, dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan beragam budaya suku, ras dan agama memiliki potensi perubahan sosial yang besar. Dari berbagai latar belakang dan usia, hampir seluruh masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan jejaring sosial sebagai sarana untuk mengumpulkan dan menyampaikan informasi kepada publik.

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein dalam Sulianta (2020) mendefinisikan media sosial sebagai "sekelompok aplikasi berbasis Internet" yang dibangun di atas fondasi ideologis dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan pembuatan dan pertukaran konten buatan pengguna. Media sosial adalah media online, dengan pengguna yang dapat dengan mudah terlibat, berbagi, dan membuat konten, termasuk blog, jejaring sosial, wiki, dan forum. Dunia digital adalah situs di mana orang dapat membuat situs web pribadi dan kemudian terhubung dengan teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi.

Keberadaan media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial di masyarakat. Perubahan hubungan sosial (*social relation*) atau sebagai perubahan keseimbangan. Hubungan sosial dan segala bentuk perubahan dalam suatu masyarakat mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku antar kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial memiliki efek positif, seperti kemudahan pengumpulan dan transmisi informasi, dengan manfaat ekonomi dan sosial. Sementara itu, perubahan sosial cenderung bersifat negatif, seperti munculnya kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku, dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma yang berlaku.

c. Faktor penghambat dan pendukung media sosial terhadap stabilitas politik dan keamanan

Penggunaan media sosial memberikan dampak yang sangat positif terutama dalam interaksi sosial, politik dan ekonomi. Penggunaan media sosial memudahkan komunikasi, antara teman dan keluarga, yang tidak bisa bertemu secara langsung karena jarak.

Seseorang dapat dengan mudah dan cepat mengirimkan informasi yang diperlukan dan mengakses informasi yang dibutuhkan. Seseorang dapat bertemu banyak teman atau keluarga yang sudah lama tidak ditemui melalui jejaring sosial Facebook. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana berbagi dan bertukar foto, data, dan dokumen lainnya.

Media sosial juga dapat digunakan sebagai media periklanan dengan berbagai produk/jasa yang dapat ditawarkan kepada pengguna media sosial tanpa harus mengeluarkan banyak biaya tetapi mendatangkan keuntungan yang besar. Dengan begitu, jangan heran jika *e-commerce* tumbuh pesat melalui media sosial, bahkan di kota-kota besar, penggunaan media politik melalui media sosial menjadi sarana yang cukup ampuh untuk mempengaruhi pasangan calon.

Namun, penggunaan media sosial juga dapat berdampak negatif bagi masyarakat, seperti yang dapat dilihat sekarang media sosial digunakan sebagai sarana untuk menebar kebencian terhadap orang lain dengan cara mengunggah kata-kata atau gambar-gambar tidak etis yang dapat menimbulkan rasa dendam dan kebencian terhadap seseorang, terutama mereka yang menduduki jabatan penting baik di pemerintahan maupun lembaga negara.

Jejaring sosial digunakan sebagai sarana untuk menghina bahkan memprovokasi orang lain, perilaku ini sangat berbahaya, terutama jika menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, sebelum terlalu jauh, perlu mengontrol penggunaan jejaring sosial sebagai sarana komunikasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Penggunaan media sosial juga berdampak pada hubungan suami istri, karena dapat menimbulkan

kecemburuan antarpasangan jika salah satu pasangan membangun hubungan yang tidak sehat. Ada banyak kasus di mana dapat dilihat sebuah keluarga pecah dan berakhir dengan perceraian karena penggunaan media sosial yang tidak terkendali dan anak-anak yang tidak bersalah berada dalam bahaya.

Penggunaan media sosial juga menyebabkan perubahan perilaku terhadap masyarakat. Misalnya menjadi kurang komunikasi dengan lingkungan sekitar, sebagai contoh saat mengantri di loket pelayanan, setiap orang sibuk dengan ponselnya tanpa memedulikan orang di sekitar.

Media sosial telah merevolusi cara kita berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Munculnya media sosial telah membuka peluang baru bagi orang untuk mengekspresikan diri dan terhubung dengan orang lain, tetapi juga membawa tantangan baru. Secara khusus, media sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik dan keamanan.

Faktor-faktor yang mendukung peran media sosial dalam mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan:

- 1) Kemudahan komunikasi: *Platform* media sosial seperti Twitter dan Facebook telah menjadi alat vital bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Hal ini memungkinkan penyebaran berita dan gagasan dengan cepat, sehingga memudahkan orang untuk mendapatkan informasi dan mengungkapkan pendapat mereka tentang masalah politik dan sosial.
- 2) Mobilisasi gerakan sosial dan masyarakat sipil: Media sosial telah menyediakan platform bagi masyarakat untuk memobilisasi dan mengorganisir gerakan sosial dan kelompok masyarakat sipil. Gerakan-gerakan ini berperan penting dalam membawa perubahan politik di banyak negara.
- 3) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah: Media sosial telah menjadi katalis untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, karena warga negara dapat

menggunakan platform ini untuk menyoroiti masalah yang menjadi perhatian, seperti korupsi. Hal ini menyebabkan pemerintah lebih tanggap terhadap masalah publik dan warga negara yang lebih terlibat.

Sementara faktor-faktor yang menghambat peran media sosial dalam mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan:

- 1) Penyebaran misinformasi dan propaganda: Media sosial juga menjadi sumber misinformasi dan propaganda, khususnya selama Pemilu. Hal ini menyebabkan meningkatnya polarisasi dan perpecahan di antara warga negara, yang dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan.
- 2) Ancaman keamanan siber: *Platform* media sosial juga rentan terhadap serangan siber dan pembobolan data, yang dapat membahayakan keamanan nasional dan mengacaukan sistem politik.
- 3) Manipulasi oleh aktor asing: Media sosial juga telah digunakan oleh aktor asing untuk memanipulasi wacana politik di negara lain. Hal ini terlihat dari campur tangan Rusia dalam pemilihan Presiden AS tahun 2016, yang menunjukkan potensi media sosial untuk digunakan sebagai alat pengaruh asing.

Untuk tegasnya, media sosial memiliki dampak positif dan negatif terhadap stabilitas politik dan keamanan. Meskipun dapat memfasilitasi komunikasi, memobilisasi gerakan sosial, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah, ia juga dapat menyebarkan informasi dan propaganda yang salah, rentan terhadap ancaman keamanan dunia maya, dan tunduk pada manipulasi pihak asing. Oleh karena itu, pertimbangan dan pengelolaan yang cermat terhadap faktor-faktor yang memengaruhi peran media sosial dalam politik diperlukan untuk memastikan sistem politik yang stabil dan aman di masa depan.

15. Kondisi Literasi Digital Masyarakat Dalam Kehidupan Politik Masih Rendah dan Rentan Terpengaruh oleh Berita yang Menyesatkan

Media sosial terus mengalami perkembangan fitur yang baru untuk dapat mengembangkan fungsionalitasnya dan memberikan kemudahan kepada pengguna. Adapun tren yang berkembang adalah munculnya kanal video pendek yang banyak digemari para pengguna. Fitur tersebut sebetulnya telah ada pada *platform* media sosial seperti Tiktok. Untuk menandingi Tiktok, Instagram meluncurkan fitur *reels* yang merupakan fitur berbagi video pendek mirip dengan Tiktok. Sejalan dengan itu, platform youtube juga meluncurkan *Youtube Short* yang juga merupakan fitur yang memiliki kemiripan untuk berbagi video pendek secara cepat. Di sisi lain, juga terdapat kemunculan media sosial baru yang memiliki fitur pada segmen-segmen tertentu. Media sosial baru tersebut diantaranya *Clubhouse* yang memiliki fitur mengobrol dan diskusi secara daring.

Alhasil, media sosial semakin digandrungi masyarakat pada berbagai segmen hal ini memberikan dampak pada perubahan berinteraksi dan berkomunikasi, serta cara mendapatkan informasi. Hal ini memunculkan potensi adanya disinformasi, *cyberbullying*, dan *bubble barrier information bias*. Disinformasi adalah informasi palsu yang tidak benar yang sengaja disebarkan untuk menipu masyarakat secara umum. *Cyberbullying* atau disebut juga dengan perundungan di dunia maya adalah setiap bentuk kekerasan secara psikis yang dialami oleh seseorang melalui dunia maya atau internet, seringkali kekerasan tersebut berupa intimidasi. *Bubble barrier information bias* adalah bias informasi akibat terjebak dalam *echo chamber* yang merupakan situasi ketika pengguna media sosial hanya menemukan konten/informasi yang sama dengan pendapatnya sehingga memperkuat kepercayaan diri. Jika dikaitkan dengan politik dan Pemilu Tahun 2024, ketiga tindakan tersebut berpotensi menimbulkan polarisasi dan konflik akibat perbedaan pandangan dan politik identitas, khususnya akibat adanya *bubble barrier* dan disinformasi.

Menjelang Pemilu Tahun 2024, perlu adanya pertimbangan aspek kerawanan di media sosial. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian mengenai potensi kerawanan Pemilu Tahun 2024 pada bidang media sosial.

Menilik pada Pemilu Tahun 2019, yang mana terjadi polarisasi akibat adanya politik identitas dimana hal tersebut dikatalisasi oleh perkembangan narasi di dunia maya. Pada saat Pemilu Tahun 2019, kedua pasangan calon saling tuduh soal politik identitas, meskipun hal tersebut tidak dilakukan secara langsung. Polarisasi politik identitas juga tidak terlepas dari adanya *buzzer* politik sebagai penggalang masyarakat untuk dapat percaya informasi yang disampaikan atau mengamplifikasi sebuah isu tertentu yang menguntungkan salah satu calon. Dampak politik identitas di dunia maya dapat meningkatkan polarisasi dan memicu konflik sosial dan pada akhirnya menjadi kerawanan pada bidang keamanan. Studi dari *Institute for Strategic Dialogue* mengungkapkan bahwa ada korelasi yang kuat antara penggunaan media sosial yang berlebihan dengan tingkat perselisihan yang tinggi antar kelompok dengan berlandaskan identitas.⁴⁹

Kondisi ini tidak bisa dimungkiri, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar, tersebar di wilayah yang sangat luas dengan latar belakang yang beragam, dan kemudahan akses informasi yang berbeda. Untuk itu, diperlukannya penguatan pemahaman literasi digital masyarakat dibidang politik, khususnya dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024.

Dalam pembahasan sebelumnya telah diungkapkan mengenai hasil survei Indeks Literasi Digital Nasional 2022 yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Asosiasi Penyedia Layanan Internet Indonesia, bahwa literasi digital masyarakat Indonesia relatif cukup tinggi sebesar 3,54 dari 5,00. Namun demikian hanya 12,5% dari total populasi yang memiliki keterampilan digital tingkat lanjut, sementara lebih dari separuh populasi (54,68%) memiliki literasi digital yang rendah atau tidak ada sama sekali.

Dari empat aspek mengenai penilaian indeks literasi digital yaitu kecakapan digital (*digital skill*), etika digital (*digital ethics*), keamanan digital (*digital safety*), dan budaya digital (*digital culture*), terdapat dua aspek yang masih relatif rendah jika dikaitkan dengan pokok pembahasan yaitu aspek

⁴⁹ Institute for Strategic Dialogue. (2018). The Impact of Identity-Based Polarisation on Social Media. Diakses pada 11 Mei 2023, dari <https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2019/08/The-Impact-of-Identity-based-Polarisation-on-Social-Media.pdf>.

etika dan budaya. Hal ini juga dikuatkan oleh pakar teknologi informasi Universitas Airlangga Rahma Sugiharti, bahwa pengoperasian teknologi digital sebagian besar masyarakat Indonesia terutama pada kalangan muda lumayan menguasai, namun kemampuan mengevaluasi dan mencerna informasi secara kritis masih rendah sehingga rentan terhadap penyebaran berita hoaks dan menyesatkan khususnya ketika event politik.⁵⁰

Rendahnya tingkat literasi digital di kalangan penduduk Indonesia di ranah politik dapat dikaitkan dengan beberapa faktor utama antara lain: **Pertama** prevalensi berita dan informasi yang menyesatkan. Dengan munculnya media sosial dan kemudahan berbagi informasi, orang sering menemukan sumber berita yang tidak akurat dan bias yang dapat dengan mudah mempengaruhi pendapat mereka. Kerentanan terhadap berita menyesatkan ini diperburuk oleh kurangnya pemikiran kritis dan keterampilan pengecekan fakta di antara penduduk Indonesia, yang mengarah pada kerentanan yang lebih tinggi terhadap manipulasi dan manipulasi melalui berita palsu. **Kedua**, kontrol pemerintah terhadap penyebaran berita hoaks dan menyesatkan masih minim. Kontrol yang dilakukan oleh pemerintah terhadap berkembangnya berbagai berita hoaks yang menyesatkan baik yang bersumber dari media sosial maupun media *on-line* masih bersifat pasif atau menunggu adanya laporan dari masyarakat. Akibatnya penyebaran berita hoaks di masyarakat lebih cepat ketimbang klarifikasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap berita-berita tersebut. **Ketiga** penyebaran misinformasi yang cepat difasilitasi oleh pemahaman literasi digital yang terbatas. Banyak orang tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengevaluasi kredibilitas dan keandalan sumber online. Kurangnya literasi dalam menavigasi lanskap digital membuat mereka rentan untuk mempercayai informasi yang salah atau menyesatkan tanpa memverifikasi keakuratannya

Ketiga faktor diatas semakin menemukan eksistensinya manakala terjadi pada tahun politik menjelang pemilihan umum. Berita-berita hoaks

⁵⁰ <https://www.republika.co.id/berita/r9b3pr430/pakar-beberkan-alasan-rendahnya-literasi-digital-masyarakat-indonesia> diakses tanggal 16 Agustus 2023

yang berkembang di masyarakat tidak akan selesai jika hanya dibahas dalam forum diskusi yang melibatkan segelintir elit, tetapi harus diklarifikasi dan disebarluaskan kepada masyarakat mengenai berita sebenarnya. Oleh karena itu media sosial maupun media *on-line* lainnya tanpa disadari telah menjadi alat komunikasi politik.

Menurut Melvin L. Defleur, komunikasi politik dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu adalah lingkungan fisik, situasi sosiokultural, dan hubungan sosial antarpelaku komunikasi. Faktor lingkungan fisik berkaitan dengan tempat komunikasi tersebut berlangsung dan dipertukarkan yaitu media itu sendiri dengan berbagai platformnya. Kita pahami bahwa penyebaran berbagai berita kepada masyarakat saat ini banyak disebarluaskan melalui media sosial baik itu *youtube, tik-tok, instagram, twitters* dan media sosial lainnya. Bagaikan dua sisi mata uang, media sosial selain memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi juga memiliki sisi negatif jika informasi yang disebarluaskan merupakan berita hoaks atau palsu. Tahun politik menjadi momentum tumbuh suburnya penyebaran berita hoaks di masyarakat. Apalagi pemerintah, DPR, dan penyelenggara Pemilu telah sepakat bahwa untuk kampanye Pemilu tahun 2024 dilakukan selama 75 hari. Durasi kampanye jauh lebih singkat dari Pemilu sebelumnya selama 6 bulan lebih. Dengan durasi masa kampanye yang sangat singkat tersebut para kandidat akan mengoptimalkan media digital, media daring dan media sosial sebagai sarana untuk mempromosikan citra diri maupun partai masing-masing kandidat. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur mengenai batas maksimum durasi iklan kampanye yang dilakukan oleh pelaksana, peserta dan tim kampanye dalam media digital, media daring dan media sosial yang berakhir sampai dengan massa tenang, namun belum ada pengaturan secara tegas mengenai penyebarluasannya oleh masyarakat umum secara luas dimedia sosial. Jika melihat fenomena sekarang, masyarakat, simpatisan partai atau kandidat melakukan komunikasi politik melalui media sosial. Mulai dari membangun reputasi dan rekam jejak prestasi sampai dengan kampanye hitam, dan kampanye negatif untuk menyerang kandidat atau partai lainnya. Dan hal ini sudah dilakukan sebelum masa kampanye berlangsung. Bisa

dibayangkan intensitasnya pada masa kampanye. Hal ini yang dikhawatirkan bahwa hari tenang yang seharusnya seluruh masyarakat dan peserta pemilu *cooling down* itu tidak akan terjadi. Masyarakat dengan media sosialnya akan terus beropini baik tentang berita yang benar maupun berita yang palsu/hoaks. Di sisi lain terhadap kondisi berkembangnya berita hoaks yang menyesatkan melalui berbagai media sosial, pemerintah seperti tidak berdaya menghadapi situasi ini. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan, namun kontrol pemerintah terhadap penyebaran berita hoaks masih minim. Padahal pemerintah memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani permasalahan ini. Mulai dari regulasi sebagai dasar hukum dalam melakukan penegakkan hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) yang mengatur sanksi terhadap penyebaran berita hoaks yang menyesatkan melalui media sosial. Pemerintah juga memiliki sumber daya Intelijen untuk menganalisis dan melakukan kontra terhadap berita hoaks dimaksud yang dapat bekerja sama dengan unsur kepolisian sebagai penegak hukum dan Kemenkominfo sebagai kementerian yang diberikan otoritas untuk melakukan tindakan terhadap media sosial itu sendiri. Bahkan beberapa pengamat menyebutkan pemerintah terkesan tebang pilih terhadap penanganan berita-berita hoaks yang terjadi khususnya terhadap lawan politik yang berbeda pandangan, walaupun hal tersebut dibantah oleh kepolisian.⁵¹ Menurut Barry Buzan dalam teori *national security*, bahwa Politik juga merupakan salah satu aspek keamanan yang berhubungan dengan otoritas legitimasi politik. Oleh karena itu, dalam rangka melindungi otoritas legitimasi politik tersebut pemerintah akan melakukan tindakan yang diperlukan untuk membangun opini melalui media sosial demi keamanan negara. Walaupun hal ini akan ditanggapi berbeda oleh lawan politik berdasarkan sudut pandang oposisi.

Faktor berikutnya adalah situasi sosiakultural. Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman sosial-kultur mencerminkan keberagaman masyarakat dalam hal bahasa, agama, adat istiadat, dan tradisi. Hal ini dapat

⁵¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180305175525-12-280647/tanggapi-fadli-zon-polisi-bantah-tebang-pilih-kasus-hoaks> diakses tanggal 16 Agustus 2023

memperkaya identitas nasional suatu negara dan memberikan kekayaan budaya yang unik, sehingga dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sangat dipengaruhi oleh adat istiadat, norma agama, norma kesusilaan yang berlaku dimasyarakat. Dalam masyarakat yang memiliki keragaman sosial kultur, rasa toleransi dan pengertian terhadap perbedaan akan menjadi lebih penting. Dalam menghadapi perbedaan ini, masyarakat akan belajar untuk saling menerima dan menghormati satu sama lain sebagaimana semboyan Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Namun saat ini Indonesai justru dihadapkan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan keragaman tersebut. Intoleransi dan politik identitas mewarnai perjalanan politik khususnya jelang pemilu tahun 2024. Hal ini berdampak pada polarisasi yang terjadi di masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan golongan. Walaupun tidak bisa digeneralisir seluruhnya tetapi dalam beberapa perhelatan pemilu hal ini nyata terjadi sehingga mempengaruhi pola komunikasi politik masyarakat khususnya dimedia sosial. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sebuah informasi dimedia sosial tidak lagi didasarkan pada data dan fakta yang ada, namun dipengaruhi oleh keberpihakan terhadap identitas tertentu. Akibatnya masyarakat terjebak pada informasi berdasarkan sentimen keberpihakan bukan lagi benar dan salah. Hal tersebut diperburuk dengan tingkat pemahaman literasi digital yang terbatas. Tidak banyak masyarakat yang melakukan klarifikasi atau pengecekan fakta terhadap informasi yang diterima, karena komunikasi politik yang telah terbangun berdasarkan keberpihakan yang didasarkan pada identitas tertentu.

Faktor berikutnya adalah hubungan sosial antarpelaku komunikasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kontestasi politik pada Pilkada DKI, Pemilu tahun 2014 dan Pemilu tahun 2019 telah membentuk polarisasi masyarakat. Polarisasi yang sebelumnya berdasarkan sosial-kultur dan identitas tertentu telah berubah mengkrucut menjadi polarisasi antara pendukung pemerintah dan oposisi. Akibatnya pola komunikasi politik dalam media sosial dipenuhi narasi dukungan dan narasi kritikan terhadap pemerintah. Ini yang disebut dengan era *post truth* dimana masyarakat mulai mengabaikan data dan fakta dan lebih mengutamakan emosi, perasaan dan kepercayaan yang sudah

terbentuk karena polarisasi. Sehingga yang terjadi oposisi akan menganggap semua informasi baik yang benar maupun palsu yang berasal dari pemerintah adalah hoaks, sebaliknya kubu pemerintah juga berpandangan sama bahwa data dan fakta yang disampaikan oleh oposisi baik data benar maupun palsu juga akan dianggap hoaks. Masyarakat terjebak pada suatu pembenaran ketimbang kebenaran.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan mengapa literasi digital masyarakat dalam kehidupan politik masih rendah dan rentan terpengaruh oleh berita yang menyesatkan antara lain: prevalensi berita dan informasi yang menyesatkan yang dipengaruhi oleh lingkungan fisik yaitu media sosial itu sendiri yang telah berkembang fungsinya sebagai media komunikasi politik. Berikutnya adalah kontrol pemerintah terhadap penyebaran berita hoaks dan menyesatkan masih minim walaupun pemerintah memiliki sumberdaya yang cukup namun tindakan pemerintah dipengaruhi pertimbangan kepentingan dan legitimasi politik sehingga penanganannya tidak maksimal. Terakhir adalah penyebaran misinformasi yang cepat difasilitasi oleh pemahaman literasi digital yang terbatas, hal ini dipengaruhi oleh polarisasi yang terjadi dimasyarakat akibat fenomena *post-truth* dimana masyarakat lebih mengedepankan pembenaran dari pada kebenaran berdasarkan data dan fakta.

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, sangat penting untuk meningkatkan literasi digital di kalangan penduduk Indonesia. Orang-orang perlu dididik tentang pentingnya pengecekan fakta, pemikiran kritis, dan literasi media dalam menilai informasi sebelum membentuk opini atau membuat keputusan. Upaya juga harus fokus pada mengajar individu bagaimana mengevaluasi secara kritis sumber yang mereka temui secara online dan membedakan informasi yang kredibel dari konten palsu atau menyesatkan. Dengan meningkatkan literasi digital dan mempromosikan pendidikan literasi media, individu dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi lanskap digital secara bertanggung jawab dan membuat keputusan yang lebih tepat ketika mengkonsumsi berita dan informasi politik

16. Strategi penguatan literasi digital guna menjaga stabilitas keamanan menjelang Pemilu Tahun 2024 dalam rangka ketahanan nasional?

Potensi ancaman media sosial/digital terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 terkait dengan polarisasi, perkembangan politik identitas, dan maraknya ujaran kebencian, penipuan, misinformasi, dan disinformasi. Seperti pada Pemilu 2019, jika tidak ditangani dengan baik, bisa menimbulkan konflik horizontal. Salah satu cara untuk mencegah dampak negatif media sosial, khususnya di tahun politik 2024 adalah dengan memperkuat literasi digital. Ada empat pilar yang harus diperhatikan dalam literasi digital, yaitu kecakapan digital (*digital skill*), etika digital (*digital ethics*), keamanan digital (*digital safety*) dan budaya digital (*digital culture*).

Pada bagian sebelumnya telah dibahas bahwa faktor yang menjadi katalisator munculnya polarisasi adalah faktor masyarakat, yang mana masyarakat masih cenderung mempercayai berita hoaks dan menerima informasi dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal inilah yang memperkecil Indeks Literasi Digital tahun 2022, yaitu pada pilar etis dan budaya digital, yang sangat erat kaitannya dengan politik dan demokrasi. Hal tersebut didukung juga dengan faktor sejarah dimana kondisi perpolitikan di Indonesia telah sejak lama berlandaskan sentimen agama. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya terencana dan strategi dalam penguatan literasi digital agar dapat efektif menjangkau masyarakat. Dalam menyusun strategi dimaksud dilakukan analisis SWOT dengan mengidentifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman.

a. Kekuatan

Aspek kekuatan merupakan aspek yang menilai secara *inward looking* terhadap apa yang kemampuan yang dimiliki bangsa Indonesia. Berdasarkan hasil identifikasi dapat ditemukan hal yang menjadi kekuatan dalam strategi penguatan literasi digital menjelang tahun politik 2024 antara lain:

Pertama, tersedianya alat ukur/indikator dalam penguasaan literasi digital di masyarakat. Hal ini dilakukan oleh Kemenkominfo melalui Indeks Literasi Digital Indonesia. Indeks Literasi Digital memiliki 4 pilar, yaitu (digital (*digital skill*), etika digital (*digital ethics*), keamanan digital (*digital safety*) dan

budaya digital (*digital culture*). *Digital skill* atau disebut juga kecakapan digital adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengetahui, memahami dan mengoperasikan pirantik TIK dalam kehidupan sehari-hari. *Digital ethics* merupakan kemampuan seseorang untuk mencotohkan, menyadari, menyesuaikan diri, berpikir rasional, menimbang dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam hidupan sehari-hari khususnya dalam interaksi dengan teknologi. *Digital safety* merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, mengenali, memolakan, mencegah dan meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Sementara itu, *digital culture* merupakan kemampuan seseorang dalam menguraikan, membiasakan, membaca, memeriksa membangun wawasan kebangsaan, nilai Ideologi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dalam interaksi dengan TIK.

Alat ukur menjadi krusial karena hal ini akan membimbing kita untuk dapat menentukan kebijakan yang tepat bagi kemajuan literasi digital dan menjaga penggunaan TIK dapat berjalan baik. Indikator juga diperlukan untuk dapat memetakan potensi kerawanan akibat kurangnya indeks literasi digital. Metodologi dalam menyusun indeks literasi digital dilakukan dengan narasumber dari berbagai kalangan seperti Generasi Z, Generasi Y, Generasi X dan Baby Boomer. Tingkat *margin of error* sebesar 0,98% dan tingkat kepercayaan mencapai 95%. Responden juga seimbang antara perempuan dan laki-laki dengan berbagai tingkat penghasilan. Indeks literasi digital ini tersaji dalam data nasional, provinsi, segmentasi masyarakat, dan daerah 3T.

Kedua, terjadi kenaikan indeks literasi digital pada tiga tahun terakhir. Sebagai negara dengan pengguna internet yang terus meningkat maka hal ini menjadi sesuatu yang wajib. Hal ini dikarenakan apabila dengan jumlah kenaikan pengguna internet, namun indeks literasi digital tidak naik maka akan menjadi permasalahan. Berdasarkan data dari Kemenkominfo Indeks literasi digital masyarakat Indonesia pada tahun 2021 berada pada posisi 3,49 atau pada level “sedang”. Pada tahun 2022 indeks literasi digital Indonesia mengalami kenaikan menjadi 3,54 atau naik sebanyak 0,05 poin, sementara dibandingkan dengan data tahun 2020 angkanya naik 0,08 point

khususnya terkait dengan interaksi masyarakat dengan teknologi. Pada aspek digital skill mengalami peningkatan dari 3,44 point pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 menjadi 3,52 point. Aspek digital ethics juga mengalami kenaikan dari 3,53 point menjadi 3,68 point pada tahun 2022. Selanjutnya dari aspek digital safety naik dari 3,10 poin menjadi 3,12. Namun demikian mengalami penurunan pada aspek digital culture yaitu dari 3,9 point menjadi 3,84 point pada tahun 2022.

Ketiga kekuatan literasi digital dalam Pemilu 2024 adalah meningkatnya kesadaran dan penekanan pada keamanan siber. Dalam beberapa tahun terakhir, isu keamanan siber menjadi semakin penting di Indonesia. Meningkatnya kesadaran ini disebabkan meningkatnya jumlah ancaman dan serangan siber yang menyasar berbagai sektor, termasuk lembaga pemerintah, korporasi, dan individu. Di sisi lain banyak negara juga telah berinvestasi dalam teknologi baru untuk mengamankan sistem Pemilu mereka.

Keempat kekuatan lainnya adalah peran pemilih yang terinformasi dan terlibat yang memiliki pemahaman yang kuat tentang literasi digital, termasuk cara mengidentifikasi misinformasi dan disinformasi. Dalam hal ini peran pemilih dalam mempromosikan literasi digital tidak bisa dianggap remeh. Dengan Pemilu yang akan datang, pemilih memiliki tanggung jawab untuk menganalisis secara kritis informasi politik dan propaganda yang tersebar di berbagai platform dan media digital.

b. Kelemahan

Aspek kelemahan merupakan aspek yang menilai secara *inward looking* terhadap apa yang menjadi ketidak mampuan atau celah yang dimiliki bangsa Indonesia pada bidang literasi digital. Berdasarkan hasil identifikasi dapat ditemukan hal yang menjadi kelemahan dalam strategi penguatan literasi digital menjelang tahun politik 2024 antara lain:

Pertama, terjadi penurunan pada pilar kultur digital, yaitu Indeks Literasi Digital 2022, sebesar 0,06 poin dari 3,9 menjadi 3,84. Meskipun penurunan dapat dikatakan tidak signifikan, namun hal ini perlu menjadi perhatian khususnya menjelang Pemilu Tahun 2024. Pilar kultur digital

merupakan kemampuan individu dalam memahami, menguraikan, membiasakan, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari melalui pemanfaatan teknologi. Pilar budaya digital menjadi pilar yang penting karena menjadi indikator penerapan ideologi Pancasila dalam melakukan pemanfaatan teknologi digital. Berdasarkan data indeks literasi digital Kemenkominfo terjadinya penurunan indeks kultur digital adalah karena terdapat salah satu indeks yang mengalami penurunan yaitu indikator pencantuman sumber apabila memposting ulang sebuah informasi yaitu pada skor 3,57. Hal ini tentunya menjadi aspek kelemahan yang menjadi pekerjaan rumah bersama karena indeks tersebut beririsan dengan perilaku masyarakat dalam menghadapi berita palsu/hoaks. Masyarakat nantinya akan cenderung menjadi bagian dari amplifikator berita palsu, yang mana hal ini sangat rawan dalam Pemilu Tahun 2024.

Kedua, masyarakat cenderung masih mempercayai berita yang tidak jelas sumbernya. Mengacu pada Survei Literasi Digital Kemenkominfo 2022, kegiatan masyarakat di internet sebagian besar dilakukan dalam rangka bersosialisasi, akses hiburan, pekerjaan, dan mengakses layanan. Dalam bersosialisasi, masyarakat cenderung melakukan kegiatan berkomunikasi lewat pesan singkat dan media sosial. Sementara itu, dari aspek hiburan masyarakat cenderung banyak melakukan akses video atau musik, mencari informasi, belanja online dan mengakses portal berita. Secara rinci masyarakat paling banyak mengakses berita atau informasi pertama melalui media sosial, kedua televisi, dan ketiga berita online. Tercatat terdapat 72,6% masyarakat menjadikan media sosial menjadi sumber informasi dan berita mereka. Berkaitan dengan itu juga, terdapat data yang menunjukkan masyarakat masih mempercayai media sosial pada posisi kedua sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Hal ini diperparah dengan masih ada masyarakat yang mempercayai hoaks khususn pada bidang politik meskipun jumlahnya tidak signifikan yaitu sebesar 6% dari total responden.

Ketiga, kurangnya kesadaran tentang pentingnya literasi digital. Beberapa orang mungkin tidak menyadari pentingnya penguatan literasi digital dan dampak positifnya pada kehidupan sehari-hari. Penyadaran yang

rendah tentang pentingnya literasi digital dapat menyebabkan kurangnya minat dan motivasi untuk mempelajari keterampilan digital. Di Indonesia, masih rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang perlunya literasi digital. Kurangnya kesadaran tentang literasi digital terus menjadi masalah signifikan di Indonesia. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pendidikan mengenai literasi digital yang terkendala oleh permasalahan ekonomi Indonesia.

Keempat, perbedaan bahasa dan budaya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan keberagaman suku, agama, adat istiadat, bahasa dan budaya. Jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 276 juta jiwa, yang dihuni oleh lebih dari 1.340 suku /etnik, memiliki lebih dari 700 bahasa daerah, serta terdapat 6 Agama dan lebih dari 187 aliran kepercayaan. Perbedaan bahasa dan budaya sering menjadi tantangan dalam penguatan literasi digital. Penggunaan bahasa dan kultur dalam pengembangan platform digital dan konten menjadi faktor penting dalam memenuhi kebutuhan individu dan kelompok yang berbeda.

c. Peluang

Adapun yang menjadi peluang yang dapat dimaksimalkan dalam strategi penguatan literasi digital, antara lain:

Pertama, kerja sama dengan pihak media sosial yang beroperasi di Indonesia. Peningkatan penggunaan media sosial di Indonesia menjadi aspek yang membawa keuntungan bagi perusahaan media sosial. Media sosial menjadi arena kampanye khususnya dalam tahun politik 2024, yang mana terjadi perang narasi, munculnya potensi hoaks, *hate speech*, dan terjebaknya masyarakat dalam algoritma media sosial. Menilik dari fakta tersebut, maka Pemerintah perlu menggandeng pihak dari perusahaan media sosial untuk dapat mendukung upaya peningkatan literasi digital dan menciptakan media yang kondusif. Proses menggandeng perusahaan media sosial tersebut dapat dilakukan dengan mekanisme kerja sama dan memorandum saling pengertian untuk dapat menciptakan stabilitas politik. Hal ini dapat selaras dengan aturan terkait dengan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor

5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Di sisi lain, Pemerintah juga dapat bernegosiasi mengenai substansi teknis media sosial agar timbul algoritma yang membawa masyarakat ke arah hal yang bersifat negatif.

Kedua, melibatkan peserta Pemilu untuk dapat mengkampanyekan literasi digital dan kampanye politik yang ramah dan damai. Kita ingat bahwa pada tahun 2019 banyak sekali muncul *buzzer* politik yang banyak menyuarakan kampanye hitam, misinformasi, dan disinformasi. Kemunculan *buzzer* tersebut tentunya untuk mendukung dan memojokkan salah satu pasangan calon. Praktik seperti ini harus ditiadakan pada Pemilu Tahun 2024, meskipun hal itu sulit. Oleh karena itu, perlu ada pemahaman dan kesamaan visi untuk dapat menjaga proses Pemilu dengan aman dan damai oleh para peserta Pemilu beserta tim suksesnya hingga pada tingkat paling bawah. Hal ini dilakukan dengan mengkampanyekan literasi digital dan budaya kampanye Pemilu yang damai, yang tidak hanya sekadar deklarasi, namun juga terdapat aksi nyata dilapangan.

Ketiga, adopsi teknologi digital oleh masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia semakin aktif menggunakan teknologi digital dalam keseharian mereka. Kebanyakan orang sekarang melakukan aktivitas seperti pembelian *online*, penggunaan media sosial, dan lain sebagainya. Ini berarti ada peluang besar bagi politisi untuk memanfaatkan *platform digital* ini untuk menyebarkan pesan politik mereka, melakukan sosialisasi kebijakan, dan memperkenalkan diri kepada masyarakat.

Keempat, tingginya tingkat penggunaan media sosial di Indonesia. Indonesia memiliki jumlah pengguna media sosial yang cukup besar, dengan WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter sebagai platform yang paling populer. Adapun media sosial tertinggi yang diakses masyarakat Indonesia, antara lain Whatsapp 88,7%, Instagram 84,8%, Facebook 81,3%, TikTok 63,1%, dan Telegram 62,8%.⁵² Oleh karena itu, potensi ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan literasi digital kepada masyarakat

⁵² "Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022".,

sumber: <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>. diakses tanggal 12 Februari 2023

termasuk politisi dapat memanfaatkan *platform-platform* tersebut untuk menyebarkan pesan politik mereka dan melakukan komunikasi langsung dengan konstituennya.

d. Tantangan

Adapun yang menjadi tantangan yang dapat menghambat penguatan literasi digital di tengah masyarakat, antara lain:

Pertama, politik identitas sejak dahulu mewarnai pesta demokrasi di Indonesia. Menilik latar belakang sejarah, Indonesia sudah kental dengan adanya perbedaan aliran politik mengacu pada agama. Sebut saja tokoh politik seperti Soekarno yang beraliran nasionalis dan M. Natsir yang cenderung agamis. Menurut kajian Herbert Feith dan Lance, tradisi Islam dan Jawa Hindu yang terpengaruh nilai barat melahirkan partai-partai seperti PKI yang menganut komunisme, PNI yang nasionalisme radikal, PSI yang menganut sosialis, NU dan Masyumi yang agamis. Sementara itu, pada saat ini diferensiasi partai politik berdasarkan ideologi terwarisi, seperti PDIP dan Gerindra yang cenderung nasionalis proteksionis, Golkar, Nasdem, dan Demokrat cenderung nasionalis pasar bebas, serta PKB, PKS, PPP yang cenderung agamis. Dalam konteks ini, potensi ancaman polarisasi dan eksese negatifnya dapat dicegah melalui kebijaksanaan para aktivis partai dalam kontestasi politik. Dalam teori konflik semakin tinggi tingkat perbedaan maka akan semakin tinggi potensi konflik yang dapat timbul. Hal ini juga tidak terlepas konflik yang terjadi di media sosial yang dapat menjadi eksese konflik di dunia nyata.

Latar belakang sejarah Indonesia yang kental dengan sentimen politik identitas menjadi tantangan kita untuk dapat memberikan pemahaman masyarakat agar menjunjung tinggi etika berkampanye khususnya dalam media digital. Penedepanan literasi digital dalam menggunakan media sosial untuk berkampanye menjadi hal mutlak. Hal ini disebabkan oleh adanya transformasi model kampanye dari turun kejalan menjadi kampanye melalui media sosial, meskipun cara konvensional tersebut tetap tidak bisa ditinggalkan.

Kedua, keterjangkauan akses informasi literasi digital. Berbicara mengenai literasi digital maka harus menjangkau seluruh elemen masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dapat kita lihat pada indeks literasi digital tahun 2022, terdapat adanya kecenderungan literasi digital penduduk di daerah yang maju yang memiliki Indeks Literasi Digital yang tinggi, meskipun terdapat daerah seperti Papua Barat yang menjadi salah satu daerah yang memiliki indeks literasi digital. Namun, sebagian besar daerah yang memiliki Indeks Literasi Digital yang tinggi merupakan daerah maju, seperti DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Oleh karena itu, diperlukan sebuah gerakan yang dapat didukung oleh berbagai *stakeholder* untuk mengkampanyekan pentingnya literasi digital. Modul literasi digital juga harus disampaikan dalam modul pembelajaran disekolah dasar di seluruh Indonesia.

Ketiga, konflik kepentingan penguasa. Konflik kepentingan politik adalah suatu situasi saat penguasa atau pejabat publik memiliki konflik antara kepentingan pribadi atau kelompoknya dengan kepentingan publik yang seharusnya diemban. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap jalannya pembangunan politik dalam negeri, termasuk penyalahgunaan literasi politik dimasyarakat untuk kepentingan penguasa. Konflik kepentingan politik dapat merusak integritas pemerintah dan melemahkan legitimasi kinerja pemerintah. Benturan kepentingan tersebut dapat menimbulkan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan pengambilan keputusan yang bias dalam pengambilan kebijakan yang pada akhirnya merugikan kepentingan publik. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, perlu ada mekanisme yang menjamin perlindungan kepentingan publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang.

Keempat, situasi global yang tidak menentu. Dunia politik sangat terkait satu sama lain, dengan peristiwa di satu negara sering kali memiliki efek riak yang signifikan pada negara lain. Indonesia tidak kebal terhadap kenyataan ini, dan keprihatinan domestiknya terkait erat dengan perkembangan politik global. Nyatanya, perkembangan teknologi militer dan industri sejak Perang Dunia II telah mengurangi batas ruang dan waktu politik dunia. Hal itu menjadikan perbedaan nasional dan global hanya semantik. Akibatnya,

keberlangsungan dan legitimasi ekonomi Indonesia sebagai wakil Asia Tenggara sangat dipengaruhi oleh peristiwa politik global.

Kebangkitan ekonomi Indonesia di kancah ekonomi global telah memberikan dampak yang signifikan terhadap politik militer dan internasionalnya. Selain itu, keanggotaan negara di G20 menyoroti kemunculannya sebagai ekonomi yang kuat dan inovatif. Namun, di tengah penghargaan global tersebut, kemajuan Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi material belum mendapatkan pengakuan yang layak. Terlepas dari potensi pertumbuhan Indonesia, ekonominya tumbuh lebih lambat dari yang ditargetkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi dan politik global dan internal sejak pertengahan tahun 2000-an.

e. Strategi

Mengingat meningkatnya prevalensi serangan dunia maya dan kampanye misinformasi yang menargetkan proses demokrasi, langkah-langkah penting harus diambil untuk meningkatkan literasi digital dan strategi keamanan dalam persiapan Pemilu Tahun 2024 untuk memastikan proses Pemilu yang adil, transparan, dan aman. Hal ini membutuhkan upaya bersama dari badan pemerintah, perusahaan teknologi, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan solusi yang efektif untuk mencegah dan menanggapi ancaman tersebut. Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman dalam peningkatan literasi digital yang telah diuraikan sebelumnya, secara ringkas dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam tabel SWOT sebagai berikut.

Tabel 1. Identifikasi SWOT

Faktor Internal	
<i>Strenght / Kekuatan</i>	<i>Weakness / Kelemahan</i>
Tersedianya alat ukur/indikator dalam penguasaan literasi digital di masyarakat	Terjadi penurunan pada pilar kultur digital indeks literasi digital
Kenaikan indeks literasi digital pada tiga tahun terakhir	Masyarakat cenderung masih mempercayai berita yang tidak jelas sumbernya
Meningkatnya kesadaran dan penekanan pada keamanan siber	Kurangnya Kesadaran tentang Pentingnya Literasi Digital
Peran pemilih yang terinformasi dan	Perbedaan Bahasa dan Budaya

terlibat yang memiliki pemahaman yang kuat tentang literasi digital	
Faktor Eksternal	
<i>Opportunity / Peluang</i>	<i>Threat / Ancaman</i>
Kerja sama dengan pihak media sosial yang beroperasi di Indonesia	Politik identitas sejak dahulu mewarnai pesta demokrasi di Indonesia
Perlibatan peserta Pemilu untuk dapat mengkampanyekan literasi digital dan kampanye politik yang ramah dan damai	Keterjangkauan akses informasi literasi digital
Adopsi teknologi digital oleh masyarakat	Konflik kepentingan penguasa
Tingginya tingkat penggunaan media sosial di Indonesia. Indonesia	Situasi global yang tidak menentu

Sumber : Diolah Penulis. 2023.

Setelah mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman guna perumusan strategi terbaik dalam peningkatan literasi digital sebagaimana metode analisis SWOT, selanjutnya dilakukan *Internal Analysis Faktor Summary (IFAS)* dan *Eksternal Analisis Faktor Summary (EFAS)* melalui pembobotan (bernilai 0 s.d 1) dan penentuan peringkat atau rating (bernilai 1–4). Pembobotan dan penentuan peringkat menggunakan urutan prioritas berdasarkan *urgency*, *seriousness* dan *growth*. *Urgency* atau urgensi, yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan, *seriousness* atau tingkat keseriusan dari masalah, yakni dengan melihat dampak masalah tersebut, dan *growth* atau tingkat perkembangan masalah yaitu apakah masalah tersebut berkembang sehingga sulit untuk dicegah.

Tabel 2. IFAS Penguatan Literasi Digital

Faktor- Faktor Internal Utama	Bobot	Peringkat	Skor
Kekuatan			
Tersedianya alat ukur/indikator dalam penguasaan literasi digital di masyarakat	0,2	4	0,8
Kenaikan indeks literasi digital pada tiga tahun terakhir	0,14	4	0,56

Meningkatnya kesadaran dan penekanan pada keamanan siber	0,1	3	0,3
Peran pemilih yang terinformasi dan terlibat yang memiliki pemahaman yang kuat tentang literasi digital	0,06	3	0,18
			1,84
Kelemahan			
Terjadi penurunan pada pilar kultur digital indeks literasi digital	0,1	2	0,2
Masyarakat cenderung masih mempercayai berita yang tidak jelas sumbernya	0,2	4	0,8
Kurangnya Kesadaran tentang Pentingnya Literasi Digital	0,14	4	0,56
Perbedaan Bahasa dan Budaya	0,06	3	0,18
			1,74
Total	1		3,58

Diolah : Penulis. 2023.

Tabel 3. EFAS Penguatan Literasi Digital

Faktor- Faktor Eksternal Utama	Bobot	Peringkat	Rata- Rata Pertimbang
Peluang			
Kerja sama dengan pihak media sosial yang beroperasi di Indonesia	0,1	4	0,4
Perlibatan peserta Pemilu untuk dapat mengkampanyekan literasi digital dan kampanye politik yang ramah dan damai	0,14	4	0,56
Adopsi teknologi digital oleh masyarakat	0,06	3	0,24
Tingginya tingkat penggunaan media sosial di Indonesia. Indonesia	0,2	4	0,8
			2
Ancaman			
Politik identitas sejak dahulu mewarnai pesta demokrasi di Indonesia	0,2	4	0,8

Keterjangkauan akses informasi literasi digital	0,1	3	0,3
Konflik kepentingan penguasa	0,14	4	0,56
Situasi global yang tidak menentu	0,06	2	0,12
			1,78
Total	1		3,78

Diolah : Penulis. 2022.

Selanjutnya disajikan posisi penguatan literasi digital dari aspek dari aspek *Strenght*, *Weaknesses*, *Opportunity*, dan *Threat*.

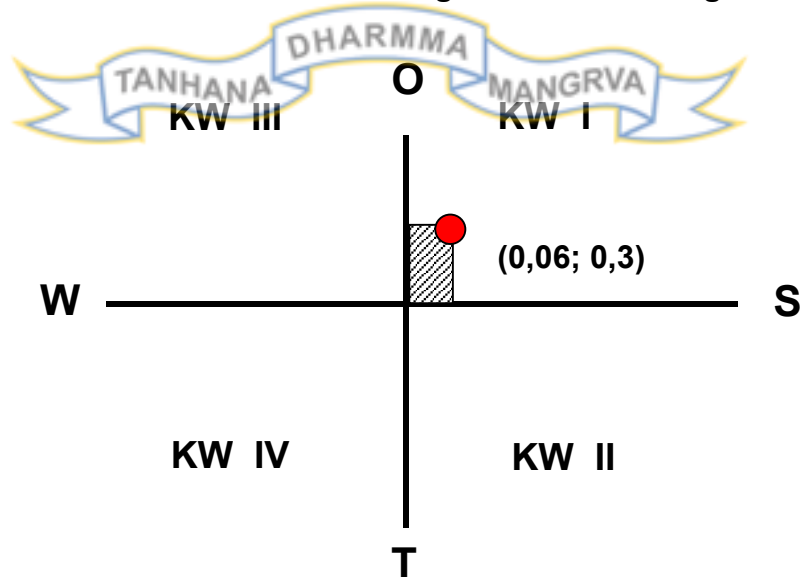
Tabel 4. Posisi Penguatan Literasi Digital

IFAS	3,58	EFAS	3,78
Total Skor Kekuatan (S)	1,84	Total Skor Peluang (O)	2
Total Skor Kelemahan (W)	1,74	Total Skor Ancaman (T)	1,78
S-W	0,06	O-T	0,3

Sumber : Diolah Penulis, 2023.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas ditentukan posisi penguatan literasi digital dalam diagram berikut.

Gambar 3. Posisi Penguatan Literasi Digital



Sumber : Diolah Penulis, 2023.

Berdasarkan posisi yang tergambar pada diagram tersebut, yang terletak pada kuadran I, maka saat ini penting untuk memprioritaskan pendidikan dan pelatihan semua pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara Pemilu dan pemilih, tentang praktik terbaik literasi digital, dan keamanan siber. Hal ini dapat dicapai melalui penyediaan program pelatihan komprehensif yang mencakup prinsip-prinsip dasar keamanan digital, antara lain kerahasiaan kata sandi, pencegahan *phishing*, dan autentikasi dua faktor. Selain itu, ada kebutuhan untuk membangun sistem pemantauan yang kuat dan mekanisme peringatan dini yang dapat mengidentifikasi ancaman dan merespons dengan segera.

Untuk mencapai hal ini, penting untuk mengadopsi pendekatan multi-stakeholder yang melibatkan aktor-aktor terkait baik dari sektor publik maupun swasta. Selain itu, perusahaan teknologi yang terlibat dalam proses Pemilu harus dimintai pertanggungjawaban atas setiap pelanggaran protokol keamanan digital dan tindakan yang diambil untuk mencegah pelanggaran ini di masa mendatang harus dibuat transparan kepada publik. Selain itu, harus ada peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi canggih untuk mengamankan proses Pemilu.

Selanjutnya, Pemilu Nasional 2024 yang akan datang bukan hanya masalah preferensi politik warga negara Indonesia, tetapi juga merupakan waktu yang sangat penting bagi stabilitas dan keamanan bangsa. Salah satu isu utama yang perlu dibenahi pada masa Pemilu adalah penyebaran misinformasi dan berita bohong yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial dan membahayakan keamanan negara. Dalam konteks ini, penguatan literasi digital menjadi aspek penting untuk menjamin stabilitas dan keamanan negara selama masa Pemilu.

Literasi digital mengacu pada kapasitas untuk mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Kemampuan untuk membedakan antara sumber informasi yang kredibel dan misinformasi merupakan komponen penting dari literasi digital. Meluasnya penggunaan *platform* media sosial sebagai sumber utama penyebaran informasi, sayangnya, menyebabkan penyebaran informasi yang salah dan berita palsu. Hal ini, pada gilirannya, dapat

menimbulkan kebingungan dan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, yang mengarah pada potensi risiko keamanan. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus pada penyediaan program literasi digital yang efektif untuk mendidik masyarakat tentang cara mengidentifikasi sumber informasi yang kredibel dan cara memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain.

Secara detail, upaya literasi digital dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan memperkuat ketahanan nasional dapat dilakukan dengan beberapa strategi yang dirumuskan melalui matriks SWOT. Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang telah teridentifikasi dimasukkan ke dalam matriks SWOT untuk dianalisis dan menghasilkan empat kelompok strategi yaitu strategi SO (*strenght-opportunity*), strategi WT (*weakness-threath*), strategi ST (*strenght-threath*) dan strategi WO (*weakness-opportunity*)⁵³.

Tabel 5. Matriks SWOT Penguatan Literasi Politik

<i>Strenght / Kekuatan</i>	<i>Weakness / Kelemahan</i>
1. Tersedianya alat ukur/indikator dalam penguasaan literasi digital di masyarakat	1. Terjadi penurunan pada pilar kultur digital indeks literasi digital.
2. Kenaikan indeks literasi digital pada tiga tahun terakhir	2. Masyarakat cenderung masih mempercayai berita yang tidak jelas sumbernya
3. Meningkatnya kesadaran dan penekanan pada keamanan siber SDI Indonesia berlimpah.	3. Kurangnya Kesadaran tentang Pentingnya Literasi Digital
4. Peran pemilih yang terinformasi dan terlibat yang memiliki pemahaman yang kuat	4. Perbedaan Bahasa dan Budaya

⁵³ -. "Analisis Matriks SWOT". <http://etheses.iainkediri.ac.id/40/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 16 Mei 2023.

	tentang literasi digital	
<p>Opportunities / Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja sama dengan pihak media sosial yang beroperasi di Indonesia 2. Perlibatan peserta Pemilu untuk dapat mengkampanyekan literasi digital dan kampanye politik yang ramah dan damai 3. Adopsi teknologi digital oleh masyarakat 4. Tingginya tingkat penggunaan media sosial di Indonesia. 	<p>Strategi SO (strength-opportunity)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya kebijakan nasional mengenai pendidikan politik secara bersifat kolaboratif dan terpadu yang melibatkan semua komponen untuk memberikan pemahaman literasi digital kepada masyarakat 2. Melakukan kerja sama dengan perusahaan media sosial untuk ikut berkontribusi dalam memberikan pemahaman literasi digital 	<p>Strategi WO (weakness-opportunity)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan program literasi digital melalui pelatihan-pelatihan kepada masyarakat bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan 2. Fokus penguatan literasi digital dikhususkan pada pilar budaya digital (<i>digital culture</i>) yang merupakan pilar yang mengalami penurunan
<p>Threats / Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Politik identitas sejak dahulu mewarnai pesta demokrasi di Indonesia 2. Keterjangkauan akses informasi literasi digital 3. Konflik kepentingan penguasa 4. Situasi global yang tidak menentu 	<p>Strategi ST (strength-threat)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat pengawasan partisipatif masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu 2. Membuat Portal pelaporan mengenai berita palsu/hoaks yang mudah diakses masyarakat 	<p>Strategi WT (weakness-threat)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan <i>filtering</i> berita palsu, perbaikan algoritma dan prosedur <i>takedown</i> akun yang memberikan dampak negatif 2. Penegakan hukum terhadap setiap penanggung jawab akun di seluruh media sosial yang secara sengaja dan terang-terangan mengampififikasi berita palsu dan hoaks

Sumber : Diolah Penulis. 2022.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, dapat disimpulkan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat literasi digital di kalangan masyarakat guna menjaga stabilitas keamanan pada Pemilu Tahun 2024, antara lain:

a. Menyusun Kebijakan Mengenai Desain Pendidikan Politik Kolaboratif dan Terpadu

Pendidikan politik telah diakui sebagai komponen penting dari masyarakat yang demokratis, dan kebutuhan akan kebijakan pendidikan politik yang kolaboratif dan terintegrasi menjadi semakin penting saat ini khususnya ditengah maraknya penggunaan media sosial yang bebas dan cenderung tidak terkendali. Kebijakan mengenai pendidikan politik memang telah dilakukan oleh berbagai instansi sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU, Bawaslu, Partai Politik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, namun pendidikan politik yang dilakukan masih secara parsial. Bahkan, sampai dengan saat ini belum ada desain atau kurikulum pendidikan politik yang baku dan berlaku secara nasional dengan materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan dinamika dan isu yang berkembang saat ini. Materi pokok dalam pendidikan politik masih fokus pada 4 (empat) konsesnsus kehidupan berbangsaan dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.⁵⁴ Sasaran yang menjadi target pendidikan politik juga setiap tahun tidak terarah, sehingga sulit untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Oleh karena itu, mengingat pendidikan politik memainkan peran penting dalam membentuk nilai, sikap, dan tindakan warga negara dalam masyarakat demokratis. Untuk mencapai tujuan ini, perlu disusun desain pendidikan politik yang komprehensif dengan pengayaan literatur dan kurikulum berbagai disiplin

⁵⁴ Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

ilmu khususnya mengenai literasi digital bidang politik termasuk kurikulum dalam dunia pendidikan formal mulai dari SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Dalam pelaksanaannya pun ke depan perlu didesain pendidikan politik yang dilaksanakan secara kolaboratif, terarah dan terpadu antara penyelenggara Pemilu, partai politik, pemerintah, pemerintah daerah termasuk pelibatan kelompok masyarakat yang secara keseluruhan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah.

b. Memperkuat Pengawasan Partisipatif Masyarakat

Landasan demokrasi telah memberi ruang yang sangat luas kepada semua pihak untuk terlibat dalam proses politik dalam mengatur negara mereka, memilih pemimpin, dan memperkuat stabilitas dan menyusun suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan Pemilu misalnya yang terlibat tidak hanya struktur dan prosedur formal, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat.

Di sinilah peran pemantauan partisipatif oleh masyarakat. Hal itu memungkinkan warga untuk memantau dan memastikan bahwa pemilihan dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Pengawasan partisipatif bertujuan untuk mendidik warga tentang hak dan tanggung jawab politik mereka. Hal tersebut memberi mereka informasi yang dibutuhkan untuk berpartisipasi langsung dalam sistem demokrasi, termasuk memantau perkembangan berita palsu sebelum Pemilu Tahun 2024.

Salah bentuk partisipatif masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman literasi digital yang dapat dilakukan adalah membuat gerakan nasional “pemilih cerdas bertanggung jawab” dengan membentuk Komunitas Online di berbagai media sosial untuk mengawasi, mengidentifikasi dan melaporkan segala bentuk berita bohong yang berkembang dimasyarakat. Gerakan ini juga dapat bekerja sama dengan perusahaan media sosial dan *streamer*/konten kreator. Potensi besar tingginya pengguna internet dan media sosial harus

dimanfaatkan untuk program-program positif sekaligus sebagai bentuk pengawasan di masyarakat.

Masyarakat dapat membentuk komunitas *online* sebagai tempat sharing informasi dan diskusi terkait berita hoaks. Komunitas *online* dapat dijadikan wadah untuk membangun kesadaran dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam menangkal berita hoaks sekaligus memberikan pemahaman literasi digital kepada masyarakat. Cara ini terbukti sangat efektif, selain membangun kesadaran dan mengklarifikasi berita bohong juga dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Sebagai contoh beberapa kali kekuatan masyarakat di dunia maya (*netizen*) berhasil menarik perhatian pejabat publik yang sedang berkuasa untuk melakukan sesuatu atau membatalkan suatu kebijakan atas dorongan dan tekanan masyarakat di dunia maya.⁵⁵ Gerakan ini akan menjadi gerakan penyeimbang dari gerakan masyarakat yang saat ini sudah terpolarisasi terhadap calon tertentu. Polarisasi yang ada perlu diintervensi dengan gerakan moral yang menjadi penengah agar tidak berkembang menjadi potensi konflik yang akan mengancam stabilitas keamanan bangsa Indonesia dan ketahanan nasional.

c. Membentuk SOP dan Portal Pelaporan Masyarakat yang Terintegrasi

Munculnya media sosial telah merevolusi cara orang berkomunikasi dan berbagi informasi. Hal ini telah menciptakan peluang dan tantangan bagi negara, termasuk dalam kaitannya dengan keterbukaan informasi dan keterlibatan pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak negara telah menyadari pentingnya membuat portal untuk melaporkan insiden terkait penyalahgunaan atau penyalahgunaan media sosial atau berita bohong oleh anggota masyarakat.

Dalam konteks ini, penting untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk portal semacam itu yang menguraikan

⁵⁵ Ungkapan Bima Yudho Saputro dalam media tik-tok yang mengkritik pembangunan di Provinsi Lampung berhasil menarik perhatian masyarakat luas bahkan langsung disambangi oleh presiden.

peran dan tanggung jawab berbagai aktor yang terlibat dan menyediakan kerangka kerja untuk pelaporan, investigasi, dan penyelesaian insiden yang efektif. Selain itu, media sosial juga menjadi faktor penting dalam penghasutan dan pencegahan kejahatan rasial, serta untuk pemolisian prediktif dan kesadaran situasional. Dengan demikian, penggunaan media sosial untuk keamanan publik juga harus menjadi pertimbangan dalam mengembangkan SOP Portal Pelaporan Masyarakat Media Sosial. Portal mengenai pelaporan berita-berita bohong memang sudah tersedia di Kemenkominfo, namun program tersebut belum berjalan secara optimal.

Perlu adanya SOP yang memberikan panduan untuk penggunaan media sosial, seperti memisahkan penggunaan pribadi dan profesional, menentukan perilaku yang pantas di platform media sosial, dan menawarkan contoh penggunaan media sosial yang sesuai. Dengan menetapkan kebijakan media sosial yang jelas dan terdefinisi dengan baik, organisasi dapat mengurangi jumlah waktu dan perhatian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegagalan dan kesalahan terkait penyalahgunaan media sosial dan dapat memungkinkan manajer memanfaatkan dan memanfaatkan potensi media sosial sambil menciptakan lingkungan yang aman untuk penggunaan media sosial.

Portal SOP Pelaporan Masyarakat Media Sosial adalah alat penting bagi negara untuk secara efektif menangani insiden terkait penyalahgunaan atau penyalahgunaan media sosial oleh anggota masyarakat, dan perhatian yang memadai harus diberikan untuk pengembangannya. Selain itu, penerapan Portal SOP Pelaporan Masyarakat Media Sosial yang tepat membutuhkan strategi komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa anggota masyarakat mengetahui keberadaannya dan memahami cara menggunakannya termasuk sosialisasi masif kepada masyarakat dalam penggunaannya.

d. Mengadakan Pelatihan Kepada Masyarakat Berbasis Komunitas

Berbagai program mengenai literasi digital telah banyak dibentuk oleh berbagai lembaga dan kementerian, antara lain Gerakan Literasi Digital (GMD) sebagai salah satu cara untuk menggalakkan literasi digital dalam pendidikan, Kurikulum Komprehensif Digital (KBB) yang memasukkan mata pelajaran literasi digital dalam kurikulum nasional untuk sekolah dasar dan menengah, *Digital Talent Scholarship* (DTS) dan Gerakan Nasional TIK (Gernas TIK), serta Program Smart City yang fokus memberikan kemudahan akses layanan informasi digital kepada warganya.

Program-program ini mempromosikan literasi digital di kalangan warga, membuat mereka lebih nyaman dengan teknologi digital. Namun, dari sekian banyak program belum secara masif tersosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan berbasis komunitas bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat (Ormas). Pelatihan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang melibatkan pemberian pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada individu dalam komunitas tertentu. Pendekatan ini telah menjadi terkenal sebagai cara yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah seperti kemiskinan, pengangguran dan akses pendidikan yang terbatas. Selain itu, pelatihan berbasis masyarakat dapat memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan di tingkat lokal dan termasuk salah satu jenis pelatihan berbasis masyarakat yang sangat relevan dengan peningkatan pemahaman literasi digital kepada masyarakat. Program ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat lokal di Indonesia. Dengan memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah, menciptakan tanggung jawab dan kontrol bersama antara pemerintah daerah dan pusat, meningkatkan akuntabilitas, mengembangkan kapasitas, dan mendorong kemandirian Pelatihan Kepada Masyarakat Berbasis Komunitas untuk mewujudkan komponen inti dari pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

e. Penegakkan Hukum

Dalam beberapa tahun terakhir, pemanfaatan *platform* media sosial telah meningkat secara eksponensial dan telah menjadi bagian integral dari komunikasi modern. Namun, dengan peningkatan penggunaan ini, muncul peningkatan potensi penyalahgunaan atau penyalahgunaan platform media sosial. Salah satu contoh penyalahgunaan yang menonjol adalah penyebaran ujaran kebencian, *cyberbullying*, dan komentar fitnah di berbagai platform media sosial. Kegiatan tersebut tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi mengganggu kohesi sosial dan memicu konflik berdasarkan perbedaan agama, suku, atau atribut lainnya yang mengancam stabilitas keamanan dan ketahanan nasional. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang yang mengatur aktivitas media sosial ditegakkan untuk mencegah potensi kerugian. Tetapi dalam konteks ini, upaya hukum merupakan jalan terakhir yang bisa ditempuh setelah semua strategi yang bersifat memberikan pemahaman literasi digital dilakukan. Penegakan hukum harus dilakukan untuk mengekang aktivitas berbahaya di media sosial ini, lembaga penegak hukum harus mengambil tindakan dengan menyelidiki dan menuntut individu yang melanggar undang-undang yang mengatur aktivitas media sosial. Selain itu, perusahaan media sosial juga harus mengambil langkah untuk menghilangkan konten berbahaya melalui kebijakan dan mekanisme mereka sendiri. Terlebih lagi, langkah-langkah tersebut harus dilakukan untuk mendidik pengguna media sosial tentang penggunaan yang bertanggung jawab dan potensi konsekuensi dari penyalahgunaan atau penyalahgunaan *platform* ini. Perusahaan media sosial dan pemerintah dapat bekerja sama untuk melakukan *filtering* berita palsu, perbaikan algoritma dan prosedur *takedown* akun yang memberikan dampak negatif.

Semua strategi tersebut harus dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan penguatan literasi digital di seluruh segmen masyarakat Indonesia. Fokus pemerintah pada isu tersebut tidak hanya akan menciptakan masyarakat yang melek digital tetapi juga berkontribusi pada transformasi digital Indonesia secara keseluruhan. Literasi digital dapat membantu

menciptakan masyarakat yang sehat yang tidak mudah dirugikan oleh informasi palsu. Oleh karena itu, penguatan literasi digital tidak hanya penting untuk keamanan negara tetapi juga untuk pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Keberhasilan strategi pada akhirnya akan bergantung pada implementasi dan penegakannya.



BAB IV PENUTUP

17. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan mengenai penguatan literasi digital guna menjaga stabilitas keamanan menjelang Pemilu Tahun 2024 dalam rangka ketahanan nasional adalah sebagai berikut:

- a. Dalam konteks kerangka ketahanan nasional, stabilitas keamanan menjelang Pemilu Tahun 2024 merupakan ujian kemampuan ketahanan kita dalam meredam guncangan dan mengubahnya menjadi perubahan positif. Meningkatnya pengguna media sosial di Indonesia memunculkan potensi ancaman instabilitas politik, terutama akibat perang narasi di media sosial. Hal ini dapat diatasi dengan penguatan literasi digital. Secara umum, tingkat literasi digital di Indonesia saat ini tergolong sedang dengan Indeks Literasi Digital sebesar 3,54 poin. Pada saat yang sama, masyarakat masih mempercayai berita yang tidak jelas sumbernya.
- b. Dari fakta tersebut dapat dipetakan bahwa ancaman stabilitas politik sebetulnya dapat ditilik dari dua faktor. Pertama adalah faktor historis dan kedua faktor eksisting. Faktor historis berkaitan dengan kondisi politik pada zaman era awal kemerdekaan yang telah bermunculan sentimen politik identitas. Sementara itu, faktor eksisting adalah perkembangan penggunaan media sosial dan algoritmanya. Dalam hal strategi penguatan, diperlukan penguatan literasi digital dengan menitik beratkan pada pilar kultur digital. Penguatan tersebut dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan Pemilu. Selanjutnya, diperlukan kerja sama dengan penyedia *platform digital* agar dapat membantu mempromosikan literasi digital dan pengaturan kemunculan algoritma yang baik bagi stabilitas politik di dunia maya. Hal ini dilakukan dengan menjangkau seluruh lapisan elemen masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia.
- c. Bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan mengapa literasi digital masyarakat dalam kehidupan politik masih rendah dan rentan

terpengaruh oleh berita yang menyesatkan antara lain: *Pertama* prevalensi berita dan informasi yang menyesatkan yang dipengaruhi oleh lingkungan fisik yaitu media sosial itu sendiri yang telah berkembang fungsinya sebagai media komunikasi politik. *Kedua* adalah kontrol pemerintah terhadap penyebaran berita hoaks dan menyesatkan masih minim walaupun pemerintah memiliki sumberdaya yang cukup namun tindakan pemerintah dipengaruhi pertimbangan kepentingan dan legitimasi politik sehingga penanganannya tidak maksimal. *Ketiga* adalah penyebaran misinformasi yang cepat difasilitasi oleh pemahaman literasi digital yang terbatas, hal ini dipengaruhi oleh polarisasi yang terjadi dimasyarakat akibat fenomena *post-truth* dimana masyarakat lebih mengedepankan pembemnararan dari pada kebenaran berdasarkan data dan fakta.

- d. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat literasi digital di kalangan masyarakat guna menjaga stabilitas keamanan pada Pemilu Tahun 2024, antara lain: *Pertama*, menyusun kebijakan mengenai desain Pendidikan Politik Kolaboratif dan Terpadu. Pendidikan politik telah diakui sebagai komponen penting dari masyarakat yang demokratis. Namun sampai dengan saat ini, belum ada desain atau kurikulum pendidikan politik yang baku dan berlaku secara nasional dengan materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan dinamika dan isu yang berkembang saat ini. Oleh karena itu, mengingat pendidikan politik memainkan peran penting dalam membentuk nilai, sikap, dan tindakan warga negara dalam masyarakat demokratis, maka perlu disusun desain pendidikan politik yang komprehensif dengan pengayaan literatur dan kurikulum berbagai disiplin ilmu. Khususnya ilmu mengenai literasi digital bidang politik, yang dalam pelaksanaannya pun perlu dibuat desain pendidikan politik yang dilaksanakan secara kolaboratif, terarah, dan terpadu antara penyelenggara Pemilu, partai politik, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hal itu juga termasuk dalam pelibatan kelompok masyarakat yang secara keseluruhan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah. *Kedua*, memperkuat pengawasan partisipatif

masyarakat. Salah bentuk partisipatif masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman literasi digital yang dapat dilakukan adalah membuat gerakan nasional “pemilih cerdas bertanggung jawab” dengan membentuk komunitas *online* di berbagai media sosial untuk mengawasi, mengidentifikasi, dan melaporkan segala bentuk berita bohong yang berkembang dimasyarakat. Gerakan ini juga dapat bekerja sama dengan perusahaan media sosial dan streamer/konten kreator. Gerakan ini juga sebagai tempat berbagi informasi dan diskusi terkait berita hoaks serta dapat dijadikan wadah untuk membangun kesadaran dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam menangkal berita hoax sekaligus sebagai gerakan penyeimbang dari gerakan masyarakat yang saat ini sudah terpolarisasi terhadap calon tertentu. **Ketiga**, membentuk SOP dan portal pelaporan masyarakat yang terintegrasi. Portal mengenai pelaporan berita-berita bohong memang sudah tersedia di Kemenkominfo, namun program tersebut belum berjalan secara optimal. Dalam konteks ini, penting untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk portal semacam itu yang menguraikan peran dan tanggung jawab berbagai aktor yang terlibat dan menyediakan kerangka kerja untuk pelaporan, investigasi, dan penyelesaian insiden yang efektif. Selain itu, penerapan SOP Portal Pelaporan Masyarakat Media Sosial yang tepat membutuhkan strategi komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa anggota masyarakat mengetahui keberadaannya dan memahami cara menggunakannya termasuk sosialisasi masif kepada masyarakat dalam penggunaannya. **Keempat**, mengadakan pelatihan kepada masyarakat berbasis komunitas. Berbagai program mengenai literasi digital telah banyak dibentuk oleh berbagai lembaga dan kementerian antara lain Gerakan Literasi Digital (GMD), Digital Talent Scholarship (DTS) dan Gerakan Nasional TIK (Gernas TIK), Program Smart City. Namun, dari sekian banyak banyak program belum secara masif tersosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan berbasis komunitas bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat (Ormas). Pelatihan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang melibatkan

pemberian pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada individu dalam komunitas tertentu. Pelatihan berbasis masyarakat dapat memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan di tingkat lokal dan termasuk salah satu jenis pelatihan berbasis masyarakat yang sangat relevan dengan peningkatan pemahaman literasi digital kepada masyarakat. **Kelima**, penegakan hukum. Upaya hukum merupakan jalan terakhir yang bisa ditempuh setelah semua strategi yang bersifat memberikan pemahaman literasi digital dilakukan. Penegakan hukum harus dilakukan untuk mengekang aktivitas berbahaya di media sosial ini, lembaga penegak hukum harus mengambil tindakan dengan menyelidiki dan menuntut individu yang melanggar undang-undang yang mengatur aktivitas media sosial. Selain itu, perusahaan media sosial juga harus mengambil langkah untuk menghilangkan konten berbahaya melalui kebijakan dan mekanisme mereka sendiri. Selain itu, langkah-langkah harus dilakukan untuk mendidik pengguna media sosial tentang penggunaan yang bertanggung jawab dan potensi konsekuensi dari penyalahgunaan atau penyalahgunaan platform ini. Perusahaan media sosial dan pemerintah dapat bekerja sama untuk melakukan *filtering* berita palsu, perbaikan algoritma dan prosedur *takedown* akun yang memberikan dampak negatif.

18. Saran

Adapun beberapa saran tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Kepada Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP serta lembaga terkait lainnya) bahwa penggunaan literasi digital harus terencana dan terkonsolidasi dengan baik mulai dari instansi pusat sampai kedaerah tentunya dengan mempertimbangkan tingkat pemahaman masyarakat agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan jadwal dan tahapan Pemilu.
- b. Kepada Pemerintah (Kemendagri, Kemendikbud, Kemenkominfo, Lemahannas dan K/L terkait lainnya) perlu menyusun desain pendidikan politik yang komprehensif dengan pengayaan literatur dan kurikulum berbagai disiplin ilmu. Terutama ilmu tentang literasi digital di bidang politik, yang dalam pelaksanaannya juga harus direncanakan

perencanaan pendidikan politik yang kolaboratif, terarah dan terpadu antara penyelenggara pemilu, partai politik, pemerintah dan kotamadya. Termasuk pelibatan kelompok masyarakat, yang diatur penuh di tingkat Keputusan Presiden atau Peraturan Pemerintah. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan terhadap penggunaan media sosial atau media digital harus distandarkan serta dipertimbangkan untuk membentuk satgas khusus yang merupakan gabungan dari berbagai instansi dengan SOP yang jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta meengedepankan jalur non litigasi dan mediasi

- c. Kepada Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh berpengaruh lainnya untuk memberikan pemahaman dan membangun kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan dan penggunaan media sosial/media digital.
- d. Dalam mengantisipasi dan mempersiapkan pemilu 2024, perlu adanya sinergi dan kolaborasi dari seluruh komponen bangsa, diantaranya adalah:
 - 1) Kemenkopolhukam, Kemendagri, KPU dan Bawaslu serta lembaga terkait lainnya dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemilu sebelumnya, termasuk identifikasi kelemahan dan masalah yang muncul. Mengumpulkan data dan umpan balik dari berbagai pihak terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), lembaga pemantau pemilu, partai politik, dan masyarakat umum
 - 2) Membentuk tim khusus yang terdiri dari perwakilan dari pemerintah, KPU, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan lainnya. Tim ini akan menjadi koordinator utama dalam merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan pemilu.
 - 3) Penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP dan lembaga terkait lainnya) dapat merancang dan melaksanakan kampanye nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pemilu dan partisipasi aktif. Kampanye ini harus mencakup pendidikan pemilih, informasi tentang hak-hak pemilih, dan penekanan pada pentingnya partisipasi yang bertanggung jawab.

- 4) KPU, Bawaslu, DKPP dapat bersinergi dan kolaborasi dengan Polri, TNI, BIN, Kominfo, BSSN hingga Satpol PP. Permasalahan klasik pemilu seperti politik uang, hoaks, ujaran kebencian, kampanye hitam dan sebagainya harus diantisipasi dan diatasi melalui kerjasama dan sinergitas dengan Kementerian Lembaga terkait dimaksud.
- 5) KPU dan Bawaslu dapat menyusun *grand desain* dan *road map* Pemilu 2024 mendatang misalnya memetakan wilayah rawan konflik dan wilayah-wilayah kepulauan yang sulit terjangkau sehingga dapat mengantisipasi segala potensi permasalahan yang akan muncul.



DAFTAR PUSTAKA

Buku/ Jurnal

Bawaslu, *Isu-Isu Krusial Pemilu Tahun 2024*, disampaikan pada Rapat Kerja Internal dalam rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan oleh KPU

Buzan, Barry. (1997). *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

Fitriani, Yuni dan Roida Pakpahan (2020) "Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace" Volume 20 No. 1 Maret 2020 P-ISSN 1411-8629, E-ISSN: 2579-3314: <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawal> diakses tanggal 23 Maret 2023

Fuady, Munir, (2010) "*Konsep Negara Demokrasi*" (Bandung, PT Refika Aditama)

Hanita, M. (2020). *Ketahanan nasional: Teori, adaptasi dan strategi*. Jakarta: UI Publishing.

Institute for Strategic Dialogue. (2018). *The Impact of Identity-Based Polarisation on Social Media*. Diakses pada 11 Mei 2023, dari <https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2019/08/The-Impact-of-Identity-based-Polarisation-on-Social-Media.pdf>.

Krisna, Didi (1993) "*Kamus Politik Internasional*" (Jakarta: Grasindo)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017) "*Materi Pendukung Literasi Digital*"

Laanela, Therese Pearce, "*Protecting Elections During Digital Transformasion*" disampaikan dalam seminar internasional yang diselenggarakan KPU RI Tanggal 29 Maret 2022.

Mardhiya Atika dkk, (2021) *UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, (Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, Volume 7 No. 2)

Plano, Jack, (1986) "*Kamus Analisa Politik* (Jakarta: CV. Rajawali Press)

Ridlwan, Zurkarnain, (2012) Negara Huykum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*” Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, ISSN 1978-5186

Schwab, K. (2017). The Fourth Industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum

Wijayanti, Punik Triesti dan Dona Budi Kharisma (2022) “Analisis Penerapan Undang-Undang Ite Ditinjau Dari Legal Drafting Theori Oleh Teori Formil Rick Dikerson” (Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Volume 1, Nomor 4)

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

Internet

Bawaslu, Tingkatkan Literasi Digital Bawaslu Susun Strategi Pengawasan Siber. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/tingkatkan-literasi-digital-bawaslu-susun-strategi-pengawasan-siber>. diakses tanggal 11 Mei 2023

BPS, Analisis SWOT https://daps.bps.go.id/file_artikel/66/Analisis%20SWOT.pdf diakses tanggal 12 Februari 2023

Bramasta, Dandy Bayu, Sederet Dampak Perang Rusia-Ukraina Bagi Ekonomi Indonesia <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/05/173000965/sederet-dampak-perang-rusia-ukraina-bagi-ekonomi-indonesia?page=all> diakses Tanggal 6 Mei 2022

BRIN, Digitalisasi Penyelenggaraan Pemilu Tingkatkan Demokrasi <https://www.brin.go.id/digitalisasi-penyelenggaraan-Pemilu-tingkatkan-kualitas-demokrasi> diakses tanggal 10 Mei 2023

Indeks Keberadaban Digital: Indonesia Terburuk se-Asia Tenggara sumber: <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-keberadaban-digital-indonesia-terburuk-se-asia-tenggara/5794123.html> diakses tanggal 20 Februari 2023

Indek Literasi Digital 2022 Kemenkominfo, 2023 <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/ReportSurveiStatusLiterasiDigitalIndonesia2022.pdf> diakses pada 13 Mei 2023

KPU RI, Manfaat Teknologi Siapkan Pemilu dan Pemilihan <https://www.kpu.go.id/manfaatkan-teknologi-siapkan-Pemilu-dan-pemilihan-2024> diakses tanggal 10 Mei 2023

KPU RI, Tangkal Hoaks Dengan Perkuat Literasi. <https://www.kpu.go.id/tangkal-hoaks-dengan-perkuat-literasi-digital> diakses tanggal 11 Mei 2023

Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022, <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>. diakses tanggal 12 Februari 2023

Pangguna Internet di Indonesia Makin Tinggi <https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-internet-di-indonesia-makin-tinggi#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20survei%20Asosiasi%20Penyelenggara,sebanyak%2010%2C03%20juta%20pengguna.> Diakses tanggal 21 Februari 2023

Peran Sosial Media Pada Gerakan Protes Massa Aksi dan Demokrasi Baru di Era Milenia <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/kjc/article/view/31-02>, diakses tanggal 12 Februari 2023

Pemilih Muda dan Literasi Politik Digital <https://mediaindonesia.com/opini/513375/pemilih-muda-dan-literasi-politik-digital>, diakses tanggal 12 Februari 2023

Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022". <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>. diakses tanggal 12 Februari 2023

Putsanra, Dipna Videlia. "Hari Demokrasi Internasional 2021: Sejarah dan Tema 15 September <https://tirto.id/hari-demokrasi-internasional-2021-sejarah-dan-tema-15-september-gjul> diakses tanggal 16 Mei 2022

We are Sosial, Pengguna Media Sosial di Indonesia Sebanyak 167 Juta pada 2023. <https://dataindonesia.id/Digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023> diakses tanggal 12 Februari 2023

<https://indonesiabaik.id/infografis/indeks-literasi-digital-indonesia-meningkat-lagi> diakses pada 12 Mei 2023

<https://perludem.org/2020/02/14/perludem-tahapan-pencalonan-pilkada-rawan-konflik/> diakses pada 13 Mei 2023

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/19/polarisasi-masyarakat-berdasarkan-agama-berpotensi-terjadi-lagi-Pemilu-2024> diakses pada 13 Mei 2023

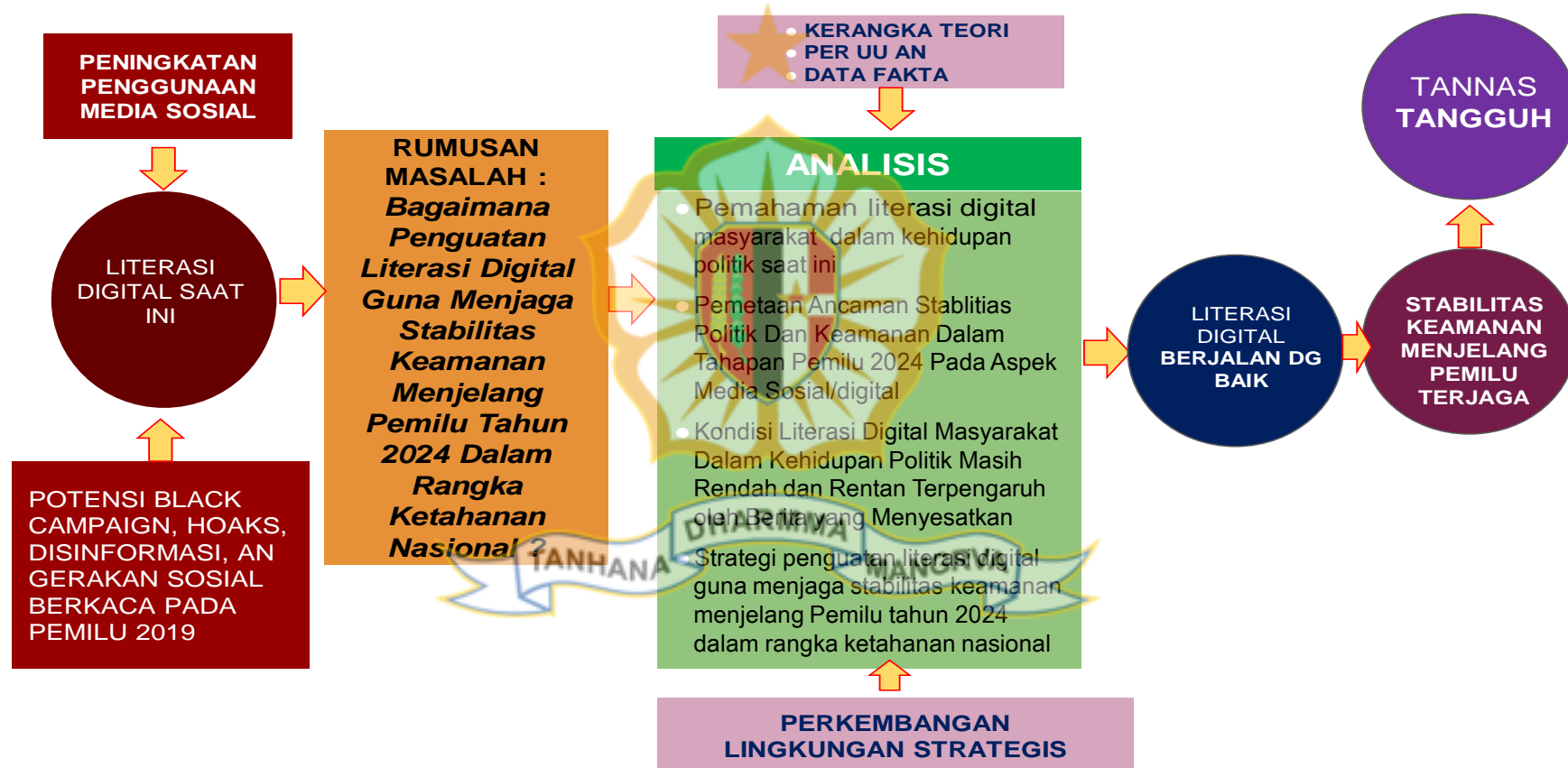
<https://politik.rmol.id/read/2023/03/02/565369/lp3es-tiktok-potensi-jadi-wadah-penyebaran-hoax-dan-hate-speech-Pemilu-2024> diakses pada 13 Mei 2023



ALUR PIKIR



PENGUATAN LITERASI DIGITAL GUNA MENJAGA STABILITAS KEAMANAN MENJELANG PEMILU 2024 DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : HERI SETYAWAN, S.I.K., M.H.
Pangkat/NRP : KOMBES POL / 71040682
Jabatan/TMT : KABIDPROPAM POLDA KALTENG (IIB3) (16-11-2020)
Lama Jabatan : 2 Tahun 1 Bulan 20 Hari
Tempat, Tanggal Lahir : KABUPATEN SEMARANG, 08-04-1971
Agama : ISLAM
Suku : JAWA
Status Personel : AKTIF

I. Pendidikan Kepolisian

Tingkat	Tahun
SESPIM	2008
PTIK	2005
AKABRI	1994

II. Pendidikan Umum

Tingkat	Nama Institusi	Tahun
S2	UNIVERSITAS LAMPUNG	2010
SMA	SMA NEGERI 2 SRAGEN	1990
SMP	SMP NEGERI 1 SERAGEN JAWA TENGAH	1987
SD	SD NEGERI 2 KEBON RAMA 2 KEC.NGEROMPOL KAB.SERAGEN	1984

III. Riwayat Pangkat

Pangkat	TMT
KOMBES POL	01-07-2018
AKBP	01-07-2009
KOMPOL	01-07-2005
AKP	01-01-2001
IPTU	01-10-1997
IPDA	06-07-1994

IV. Riwayat Jabatan

Jabatan	TMT
KABIDPROPAM POLDA KALTENG (IIB3)	16-11-2020
KABIDKUM POLDA LAMPUNG (IIB3)	08-03-2018
WADIRLANTAS POLDA LAMPUNG (IIIA1)	30-05-2013
KAPOLRES LAMPUNG TENGAH POLDA LAMPUNG (IIIA2)	19-10-2011
PAMEN DITLANTAS POLDA LAMPUNG (KASUBDIT MIN REGIDENT DIT LANTAS POLDA LAMPUNG)	27-02-2009
KASUBBAGSTRABANG BAGSTRAJEMEN RORENA POLDA LAMPUNG (KABAG STRABANG RO RENBANG POLDA LAMPUNG) (IIB2)	12-08-2008
PAMEN POLDA LAMPUNG	13-06-2008
KAPOLRES SUPIORI POLDA PAPUA (IIIA2)	21-12-2006
KAURANEV SUBBAGDUMASANWAS ITWASDA POLDA PAPUA (KSBG ANEV ITWASDA POLDA PAPUA) (IVA)	19-05-2006
WAKAPOLRES SORONG POLDA PAPUA BARAT (WAKAPOLRESTA POLDA SORONG) (IIB1)	11-02-2006
KABAGOPS POLRES SORONG POLDA PAPUA BARAT (KABAGOPS POLRES SORONG) (IIB1)	18-04-2005
PAMA PTIK	30-09-2003
GADIK MADYA SPN POLDA RIAU (GADIK MADYA SPN PERLA BASAH) (IIB2)	20-09-2003
KASATLANTAS POLRESTA BARELANG POLDA KEPRI (IIB2)	26-10-1999
KAPOLSEK BALAI KARIMUN POLRES KARIMUN POLDA KEPRI (IIIB2)	21-10-1998
WAKASATLANTAS POLRESTA PEKANBARU POLDA RIAU (IIB2)	09-05-1997
KAURBINOPSINAL SATLANTAS POLRES BENGKALIS POLDA RIAU (IVB)	22-08-1996
PAMA POLRES DUMAI POLDA RIAU	06-09-1995

V. Pendidikan Pengembangan & Pelatihan

Dikbang	TMT
JUR LAN PA REG IDENT LANTAS	1998
DIKJUR DAS PA LANTAS	1996
KEJURUAN LANJUTAN PA PJR SABHARA	1996
KEJURUAN LANJUTAN PA PJR SABHARA	1995

VI. Tanda Kehormatan

Tanda Kehormatan	TMT
BINTANG BHAYANGKARA NARARIYA	2019
SATYALANCANA PENGABDIAN 24 TAHUN	2019
SATYALANCANA PENGABDIAN 8 TAHUN	2010
SATYALANCANA PENGABDIAN 16 TAHUN	2010

VII. Kemampuan Bahasa

Bahasa	Status
INGGRIS	TIDAK AKTIF
JAWA	AKTIF

VIII. Penugasan Luar Struktur

Penugasan	Lokasi
Data penugasan luar struktur tidak ditemukan	